

**PERUBAHAN  
RENCANA STRATEGIS  
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
TAHUN 2016-2021**



**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2019  
Jl. A. Yani No.003 Bengkalis**

## KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr.Wb.

Puji syukur dipanjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan limpahan Nya sehingga perubahan Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkalis tahun 2017 ini telah dapat diselesaikan secara baik berdasarkan hasil evaluasi hingga tahun sebelumnya dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkalis tahun 2016 -2021.

Rencana Strategis BPBD Kabupaten Bengkalis ini merupakan dokumen perencanaan 5 ( lima ) tahunan sesuai periode RPJMD Kabupaten Bengkalis yakni dari tahun 2016 – 2021.

Rencana Strategis BPBD Kabupaten Bengkalis ini menyajikan rencana program dan kegiatan BPBD pada tahun 2016 yang disertai dengan pagu anggaran indikatif berdasarkan asumsi dan perkiraan perkembangan ekonomi makro daerah yang secara eksplisit dijelaskan dalam RPJMD Kabupaten Bengkalis. Dalam Renstra BPBD ini juga disajikan target capaian indikatif daerah berdasarkan arahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 yang mencangkup target yang dicapai oleh Kabupaten Bengkalis padaakhir periode RPJMD.

Akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah ikut berperan dalam penyusunan Renstra ini. Semoga Allah SWT selalu meridhoi segala upaya yang kita lakukan dalam mengabdikan bagi kepentingan Masyarakat Bangsa dan Negara. Amin Ya Rabbal Alamin.

Wasalamu alaikum Wr.Wb.

Bengkalis, 24Juli 2019

KEPALA PELAKSANA BPBD  
KABUPATEN BENGKALIS

Ir. H. TAJUL MUDARRIS, MT  
Pembina Utama Muda  
NIP.19630717 199303 1 005

## DAFTAR ISI

COVER	
KATAPENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum.....	3
1.3. Maksud dan Tujuan.....	4
1.4. Sistematika Penulisan.....	4
BAB II GAMBARAN UMUM PELAYANAN BPBD	6
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi.....	6
2.2. Sumber Daya Aparatur BPBD.....	26
2.3. Kinerja Pelayanan BPBD Periode 2016 – 2021.....	28
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan.....	30
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	31
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi BPBD	31
3.2. Telaah Visi, Misi RPJMD Kabupaten Bengkalis Tahun 2016 – 2021.....	34
3.3. Telaah RENSTRA BNPB dan RENSTRA BPBD Prov. Riau.....	35
3.4. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah.....	39
3.5. Penentuan Isu-isu Strategis.....	40
	44

BAB IV VISI,MISI,TUJUAN DAN SASARAN	
4.1.	Visi dan Misi BPBD Kabupaten Bengkalis..... 44
4.2.	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BPBD..... 48
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN..... 51	
5.1.	Strategi dan Arah Kebijakan 51
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF..... 53	
6.1.	Rencana Program dan Kegiatan..... 53
6.2.	Matrik Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif... 54
BAB VII INDIKATOR KINERJA OPBD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD..... 64	
BAB VIII PENUTUP..... 65	

# **BAB I PENDAHULUAN**

## **1.1. Latar Belakang**

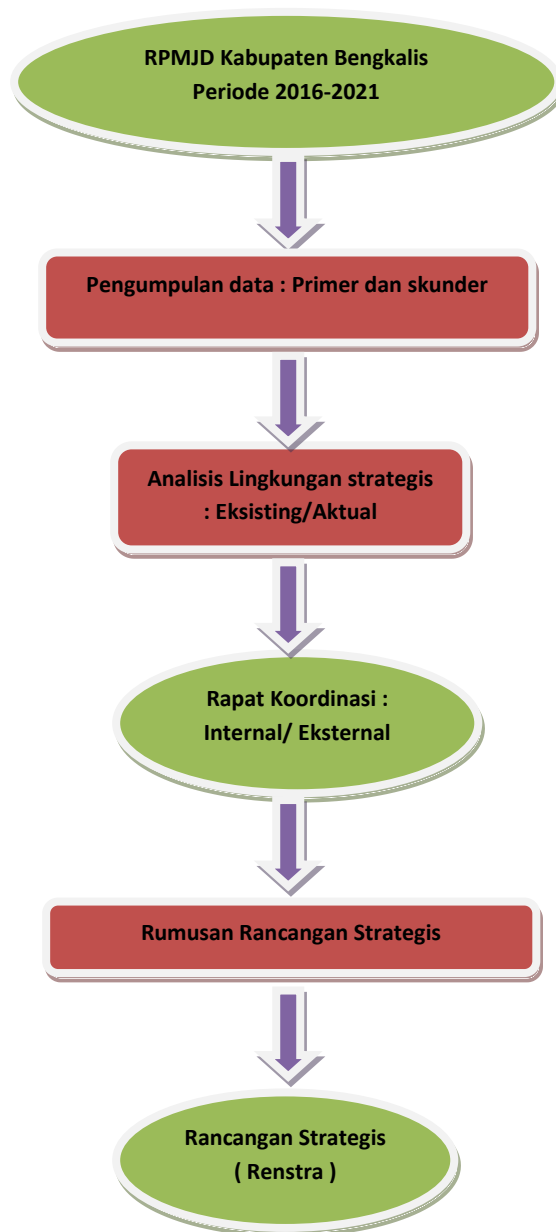
Mengacu Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional yang dilakukan pemerintah daerah bersama aparapemangku kepentingan berdasarkan perandankewenangannya, berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah sesuai dinamika pembangunan.

Perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan nasional yang diatur dalam Undang-undang Nomor 25 tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan kepada Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra).

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) serta dengan memperhatikan RPJM Nasional.

Berdasarkan hal tersebut maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkalis menyusun Rencana Strategis Tahun 2016-2021 yang merupakan dokumen perencanaan lima tahun yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di bidang Penanggulangan Bencana Daerah berdasarkan kondisi dan potensi daerah di Kabupaten Bengkalis.

Gambar 1.1  
Proses Penyusunan Rencana Strategis



## 1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkalis adalah :

1. Undang – undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara tahun 2008 No. 42, Tambahan lembaran Negara Nomor 4828)
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara tahun 2008 Nomor 42, Tambahan lembaran Negara Nomor 48829)
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah.
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
11. Peraturan kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
12. Peraturan daerah Nomor 03 Tahun 2016 tentang pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan penanggulangan Bencana Daerah.

13. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pedoman Penanggulangan Bencana Kabupaten Bengkalis.
14. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 65 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Eselonering, Tugas Pokok dan Fungsi serta Uraian Tugas pada Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Bengkalis;

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

#### **1. Maksud**

Penyusunan RENSTRA Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2016-2021 di susun sebagai penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2016-2021 sesuai tugas pokok dan fungsi yang di emban Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkalis, sebagai mana tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis nomor 03 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat Daerah kabupaten Bengkalis serta peraturan Bupati nomor 65 tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, eselonering, tugas, fungsi dan uraian tugas serta tata kerja dan sebagai dokumen perencanaan pembangunan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkalis.

#### **2. Tujuan**

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Tujuan dari penyusunan Rencana Strategi ini adalah dokumen untuk pedoman pencapaian target 2016-2021 yang di dalamnya tertuang visi, misi, tujuan dan sasaran yang diukur dengan seperangkat indikator kinerja berupa output dan outcome beserta target tahunan yang jelas.

### **1.4. Sistematika Penulisan**

Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkalis disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2016-2021 dalam rangka pemenuhan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

## **BAB I PENDAHULUAN**



Bab ini menjelaskan tentang latar belakang, tujuan, dasar hukum, ruang lingkup dan sistematika penulisan.

#### BAB II GAMBARAN UMUM PELAYANAN BPBD

Bab ini menjelaskan tentang tugas pokok dan fungsi dan kinerja pelayanan BPBD

#### BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Bab ini menjelaskan tentang Identifikasi Permasalahan Berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan, Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah terpilih, Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dan Penentuan Isu-isu Strategis.

#### BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

Bab ini menjelaskan tentang Visi dan Misi BPBD Tujuan dan Sasaran Jangkat Menengah Perangkat Daerah.

#### BAB V VISI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini menjelaskan Strategi dan Arah kebijakan DPMD dalam lima tahun mendatang.

#### BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF.

Bab ini menjelaskan Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif.

#### BAB VII INDIKATOR KINERJA UTAMA DAN KAEDAH CAPAIAN

Bab ini menjelaskan capaian dan indikator kinerja utama terhadap program dan kegiatan.

#### BAB VIII PENUTUP

Bagian ini menjelaskan penyajian kata-kata Penutup dari Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Bengkalis.

## **BAB II**

### **GAMBARAN UMUM PELAYANAN**

### **BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**

#### **2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi**

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkalis merupakan lembaga teknis daerah yang di bentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 03 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkalis mempunyai tugas untuk melakukan koordinasi dan penyelenggaraan serta pelayanan administrasi di bidang penanggulangan bencana. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkalis mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Penyusunan Program Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
2. Menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat dan rehabilitasi serta Rekonstruksi;
3. Menetapkan standarisasi, kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana dan rehabilitasi serta Rekonstruksi;
4. Menyusun dan menetapkan serta menginformasikan peta rawan bencana;
5. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap (protap) penanganan bencana;
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;

#### 1. Kepala

Mempunyai tugas sebagai berikut :

- a) Memimpin dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkalis sebagaimana dimaksud pada ketentuan pasal 25 Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 03 tahun 2016 tentang organisasi dan tata kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan lembaga teknis lainnya.
- b) Memimpin dan membina bawahannya dalam rangka pelaksanaan tugas dan pencapaian tujuan organisasi

- c) Melakukan pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis (UPT)
- d) Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugasnya

## 2. Unsur Pengarahan

Mempunyai tugas sebagai berikut :

- a) Unsur pengarah mempunyai tugas pokok memberikan saran masukan dan pertimbangan kepada kepala dalam penetapan rencana, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian , penanggulangan bencana serta secara terintegrasi yang meliputi pra bencana tanggap darurat bencana dan pasca bencana.
- b) Unsur pengarah dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 menyelenggarakan fungsi :
  - Perumusan konsep kebijakan pelaksanaan dibidang penanggulangan bencana;
  - Pemantauan terhadap pelaksanaan pengawasan dan pengendalian penanggulangan bencana secara terintegrasi yang meliputi pra bencana tanggap darurat bencana dan pasca bencana;
  - Pelaksanaan Evaluasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana yang meliputi pra bencana, tanggap darurat bencana dan pasca bencana;
  - Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan BPBD.

## 3. Kepala pelaksana

Mempunyai tugas sebagai berikut :

- a) Membantu Kepala dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi kepala sehari-hari dan melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi meliputi pra bencana tanggap, darurat bencana dan pasca bencana.
- b) Kepala Pelaksana dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 menyelenggarakan fungsi :
  - Perumusan kebijakan teknis dibidang penanggulangan bencana;
  - Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah dibidang penanggulangan bencana;

- Pengkoordinasian, pembinaan dan fasilitasi dalam pelaksanaan tugas dibidang pencegahan dan kesiapsiagaan, penanganan darurat, rehabilitasi, rekonstruksi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala BPBD.

#### 4. Sekretariat

Mempunyai tugas Sebagai Berikut :

- a. Sekretaris mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas dibidang pengelolaan, pelayanan kesekretariatan yang meliputi pengkoordinasian perencanaan penyusunan program dan anggaran, pengelolaan keuangan, perlengkapan dan tata usaha;
- b. Sekretaris dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
  - Penyusunan rencana, program, evaluasi dan pelaporan;
  - Pelaksanaan administrasi kepegawaian dan rumah tangga Badan BPBD Kabupaten Bengkalis.
  - Pelaksanaan administrasi keuangan dan perlengkapan serta penataan aset;
  - Pelaksanaan urusan surat menyurat; kearsipan dan dokumentasi dan hubungan masyarakat;
  - Pelaksanaan urusan hukum, organisasi dan hubungan masyarakat;
  - Pelaksanaan pengkoordinasian penyelenggaraan tugas-tugas bidang;
  - Pelaksanaan tugas-tugas lain yan diberikan oleh Kepala Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Bengkalis.
- c. Susunan Organisasi Sekretariat, terdiri dari :
  1. Sub Bagian Penyusunan Program;
  2. Sub Bagian Tata Usaha;
  3. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan.

##### 4.1. Sub Bagian Penyusunan Program

- (1) Sub Bagian Penyusunan Program mempunyai tugas menyiapkan bahan-bahan bimbingan, kebijakan, pedoman, dan petunjuk teknis serta layanan dibidang Penyusunan Program sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

- (2) Rincian Tugas tersebut pada ayat (1) sebagai berikut ;
- a. Merencanakan kegiatan Sub Bagian Penyusunan Program berdasarkan data kegiatan tahun sebelumnya dan sumber data yang ada sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan;
  - b. Menghimpun dan mempelajari Peraturan Perundang-undangan kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas Sub Bagian Penyusunan Program;
  - c. Mencari, mengumpulkan, menghimpun, dan mensistematiskan dan mengolah data serta menganalisa data dan informasi yang berhubungan dengan tugas Sub Bagian Penyusunan Program sebagai kerangka acuan / pedoman penyusunan program dan anggaran kegiatan;
  - d. Menginventarisir permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan tugas Sub Bagian Penyusunan Program serta menyiapkan bahan-bahan dalam rangka pemecahan masalah;
  - e. Menyiapkan bahan penyusunan kebijaksanaan, pedoman dan petunjuk teknis dibidang Penyusunan Program;
  - f. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan dengan bidang dan satuan kerja perangkat daerah terkait lainnya;
  - g. Mengkoordinir penyusunan dan pembuatan Rencana Kerja Tahunan / RKT. Arah Kebijakan Umum (AKU) Rencana Kerja Operasional Perangkat Daerah (RENJA OPD) dan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ), serta Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
  - h. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait dalam rangka peningkatan pengelolaan urusan penyusunan program, perencanaan dan anggaran;
  - i. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan antara aparatur dan publik untuk menghindari terjadinya duplikasi kegiatan;

- j. Menghimpun dan menyiapkan RKA serta mengkoordinir proses pembahasan dengan instansi terkait sampai menjadi DPA;
- k. Menyusun kelengkapan administrasi, guna melaksanakan kegiatan tahunan berupa petunjuk operasional, penunjukan pejabat pelaksanaan teknis kegiatan dan dokumen kontrak dan menyiapkan revisi (perubahan) DPA;
- l. Mengupayakan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBDP) guna menampung usulan program pembangunan yang mendesak yang tidak direncanakan sebelumnya;
- m. Memberikan saran dan pertimbangan kepala Sekretaris tentang langkah-langkah atau tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya;
- n. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Penyusunan Program sesuai dengan data yang ada berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan untuk dipergunakan sebagai bahan masukan bagi atasan;
- o. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas pada Sekretariat.

#### 4.1 Sub Bagian Tata Usaha

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas menyiapkan bahan-bahan bimbingan, kebijakan, pedoman, dan petunjuk teknis serta layanan dibidang Tata Usaha sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- (2) Rincian Tugas tersebut pada ayat (1) sebagai berikut :
  - a. Merencanakan kegiatan Sub Bagian Tata Usaha berdasarkan data kegiatan tahun sebelumnya dan sumber data yang ada sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan;
  - b. Menghimpun dan mempelajari Peraturan perundang-undangan kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-

- bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Mencari, mengumpulkan, menghimpun, dan mensistемasikan dan mengolah data serta menganalisa data dan informasi yang berhubungan dengan tugas Sub Bagian Tata Usaha sebagai kerangka acuan/pedoman penyusunan rencana kegiatan;
  - d. Menginventarisir permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan tugas Sub Bagian Tata Usaha serta menyiapkan bahan-bahan dalam rangka pemecahan masalah;
  - e. Mengarahkan dan mendistribusikan surat masuk dan keluar sesuai dengan kepentingan dan permasalahannya;
  - f. Meneliti usulan permintaan formasi pegawai lingkup Badan, dan menyiapkan konsep petunjuk penyusunan formasi pegawai-pegawai sebagai perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan badan;
  - g. Mengatur urusan rumah tangga, menata keindahan dan kebersihan kantor;
  - h. Melakukan pengelolaan perpustakaan, kearsipan dan melakukan pendokumentasikan kegiatan;
  - i. Melakukan tugas dibidang hukum, organisasi dan tata laksana serta hubungan masyarakat;
  - j. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris tentang langkah-langkah atau tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya;
  - k. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan sub Bagian Tata Usaha sesuai dengan data yang ada berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan untuk dipergunakan sebagai bahan masukan bagi atasan;
  - l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas pada Sekretariat.

#### 4.2 Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan

- (1) Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan mempunyai tugas menyiapkan bahan-bahan bimbingan, kebijakan, pedoman, dan

petunjuk teknis serta layanan dibidang Keuangan dan Perlengkapan sesuai dengan ketentuan yang beraku;

(2) Rincian Tugas tersebut pada ayat (1) sebagai berikut ;

- a. Merencanakan kegiatan Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan berdasarkan data kegiatan tahun sebelumnya dan sumber data yang ada sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang telah ditetapkan;
- b. Menghimpun dan mempelajari Peraturan Perundang-undangan kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan;
- c. Mencari, mengumpulkan, menghimpun, dan mensistemasikan dan mengolah data serta menganalisa data dan informasi yang berhubungan dengan tugas Sub Bagian keuangan dan perlengkapan sebagai kerangka acuan / pedoman penyusunan rencana kegiatan;
- d. Menginventarisir permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan tugas Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan serta menyiapkan bahan-bahan dalam rangka pemecahan masalah;
- e. Menghimpun dan mempersiapkan bahan dan data untuk penyusun rencana kebutuhan barang;
- f. Mengusulkan kepada Sekretaris tentang penunjukan bendahara pengeluaran, pembantu bendahara pengeluaran, penyimpan barang, pengurus barang dan pembantu pengurus barang;
- g. Melakukan pengawasan, pengendalian dan mengevaluasi terhadap kinerja bendahara pengeluaran, pembantu bendahara pengeluaran penyimpan barang, pengurus barang dan pembantu pengurus barang;
- h. Melakukan pengawasan terhadap inventaris barang serta membuat Kartu Inventaris Barang (KIB) dan membuat Kartu Inventaris Ruangan (KIR);
- i. Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan yang mencakup administrasi gaji pegawai, insentif tenaga kerja



- sukarela, PNS, melakukan usulan kenaikan gaji berkala serta melakukan pembukuan, membuat Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Keuangan, evaluasi dan laporan kegiatan keuangan Badan;
- j. Mengatur perlengkapan kantor, penataan dan pengamanan aset, tindak lanjut LHP, ganti rugi serta proses administrasi perjalanan dinas pegawai sesuai petunjuk atasan;
  - k. Memberikan sasaran dan pertimbangan kepada Sekretaris sebagai bahan masukan untuk penentuan kebijakan lebih lanjut;
  - l. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan sebagai bahan pertanggungjawaban;
  - m. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas pada Sekretariat.

5. Bidang pencegahan dan Kesiapsiagaan.

- (1) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai tugas pokok membantu kepala dalam pengkoordinasian dan pelaksanaan penanggulangan bencana yang berkaitan dengan Pencegahan dan Kesiapsiagaan serta melaksanakan penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan.
- (2) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
  - a. Penetapan penyusunan rencana dan program dan pelaksanaan pencegahan, dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana;
  - b. Pembinaan, Pengkoordinasian, pengendalian dan pengawasan program bidang pencegahan dan kesiapsiagaan;
  - c. Penetapan rumusan kebijakan dan panduan pengetahuan dan kesiapsiagaan terhadap resiko bencana;
  - d. Penetapan rumusan kebijakan system peringatan bencana dan rencana keadaan darurat bencana;
  - e. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi program kegiatan bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan;

f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan.

(3) Susunan Organisasi Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan terdiri dari :

1. Seksi perencanaan Emergency;
2. Seksi pencegahan dan Kesiapsiagaan.

#### 5.1. Seksi perencanaan Emergency

(1) Seksi Perencanaan Emergency mempunyai tugas menyiapkan bahan-bahan penyusunan perumusan kebijakan teknis pada perencanaan emergency, pembinaan pelaksanaan perencanaan emergency.

(2) Rincian Tugas tersebut pada ayat (1) sebagai berikut :

- a. Merencanakan Kegiatan seksi Perencanaan Emergency berdasarkan kegiatan tahun sebelumnya serta sumber data yang ada sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan;
- b. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan seksi Perencanaan Emergency;
- c. Mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mengolah data serta informasi yang berhubungan dengan Perencanaan Emergency;
- d. Menyiapkan bahan penyusunan kebijaksanaan, pedoman dan petunjuk teknis dibidang Perencanaan Emeergency;
- e. Menyusun dan melaksanakan program kerja di Seksi Perencanaan Emergency;
- f. Pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan dibidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat bencana, penanganan pengungsi dan dukungan perencanaan;
- g. Pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi atau lembaga terkait dibidang penanggulangan bencana;
- h. pada saat tanggap darurat bencana, penanganan pengungsi dan dukungan perencanaan;
- i. Penghimpunan, pengolahan dan penyajian data dibidang kedaruratan;

- j. Pelaksanaan monitoring, pengendalian, evaluasi dan pelaporan lingkup bidang kedaruratan;
- k. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan sebagai bahan masukan untuk penentuan kebijakan lebih lanjut;
- l. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan seksi Perencanaan Emergency sesuai dengan data yang ada berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan untuk dipergunakan sebagai bahan masukan bagi atasan;
- m. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan baik lisan maupun tulisan sesuai dengan tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan.

## 5.2. Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan

- (1) Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai tugas menyiapkan mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan dibidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pra bencana serta memberdayakan masyarakat.
- (2) Rincian tugas tersebut pada ayat (1) sebagai berikut ;
  - a. Merencanakan kegiatan Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan berdasarkan kegiatan tahun sebelumnya serta sumber data yang ada sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan;
  - b. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan pencegahan dan kesiapsiagaan;
  - c. Mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mengolah data serta informasi yang berhubungan dengan pencegahan dan kesiapsiagaan;
  - d. Menginventarisasikan permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan pencegahan dan kesiapsiagaan serta menyiapkan petunjuk pemecahan masalah;

- e. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis dibidang pencegahan dan kesiapsiagaan;
- f. Menyusun program kerja di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan;
- g. Mengkoordinasikan dan pemantauan terhadap penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam, penggunaan teknologi yang secara tiba-tiba dan atau berangsur berpotensi menjadi sumber ancaman atau bahaya bencana;
- h. Menyiapkan baha monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- i. Menyiapkan pengorganisasian, pemasangan pengujian peringatan diri;
- j. Menyiapkan bahan dan analisis data kesiapsiagaan atas bencana;
- k. Menyusun bahan rumusan kebijakan dibidang pemberdayaan dan peningkatan masyarakat terhadap pencegahan bencana dan mitigasi pada prabencana;
- l. Menyediakan dan menyiapkan barang pasokan pemenuhan kebutuhan dasar;
- m. Menyiapkan pengorganisasian, penyuluhan, pelatihan dan gladi tentang mekanisme tanggap darurat serta menyiapkan lokasi evakuasi;
- n. Menyusun dan melaksanakan penyuluhan, pendidikan dan pelatihan, gladi/ simulasi system dan mekanisme pencegahan dan mitigasi pada prabencana;
- o. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang Pencegahan dan kesiapsiagaan sebagai bahan masukan untuk penentuan kebijakan lebih lanjut;
- p. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan seksi pencegahan dan kesiapsiagaan sesuai dengan data yang ada berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan untuk dipergunakan sebagai bahan masukan bagi atasan;
- q. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan baik lisan maupun tulisan

sesuai dengan tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan.

#### 6. Bidang Sarana dan Logistik Penanggulangan Bencana

- (1) Bidang Sarana dan Logistik Penanggulangan Bencana mempunyai tugas pokok membantu kepala dalam melaksanakan kebijakan sarana pada saat tanggap darurat dan dukungan logistik penanggulangan bencana.
- (2) Bidang Sarana dan Logistik Penanggulangan Bencana dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi ;
  - a. Penyusunan program kerja di bidang Sarana dan logistik Penanggulangan Bencana di Daerah;
  - b. Penyusunan petunjuk teknis lingkup Sarana dan Logistik Penanggulangan Bencana;
  - c. Pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan sarana dibidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat bencana, penanggulangan pengungsi dan dukungan logistik;
  - d. Penghimpunan, pengolahan dan penyajian data bidang sarana dan logistik penanggulangan bencana;
  - e. Penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan daerah di bidang sarana dan logistik penanggulangan bencana ;
  - f. Penetapan rumusan kebijakan tanggap darurat dan logistik yang meliputi penyelenggaraan dapur umum, pendirian tenda-tenda penampungan untuk pengungsi, darat dan air pencarian, penyelamatan dan pengungsian korban serta harta benda, penyiapan air bersih, percepatan akselerasi bantuan darurat dan pendirian tenda posko komando;
  - g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Susunan Organisasi Bidang Sarana dan Logistik Penanggulangan Bencana, terdiri dari :
  1. Seksi Penyiapan Sarana dan Prasarana Darurat;
  2. Seksi Penyediaan dan Distribusi Logistik;

#### 6.1. Seksi Penyiapan Sarana dan Prasarana Darurat

- (1) Seksi Penyiapan Sarana dan Prasarana Darurat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan sarana dan prasarana darurat ;
- (2) Rincian tugas tersebut pada ayat (1) sebagai berikut ;
  - a. Merencanakan kegiatan Seksi Penyiapan Sarana dan Prasarana Darurat berdasarkan kegiatan tahunan sebelumnya serta sumber data yang ada sebagai bahan untuk melaksana kegiatan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan;
  - b. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan penyiapan sarana dan prasarana darurat;
  - c. Mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mengolah data serta informasi yang berhubungan dengan penyiapan sarana dan prasarana darurat.
  - d. Menyiapkan bahan penyusunan kebijaksanaan, pedoman dan petunjuk teknis dibidang penyiapan sarana dan prasarana darurat;
  - e. Menginventarisasikan permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan penyiapan sarana dan prasarana darurat serta menyiapkan petunjuk pemecahan masalah;
  - f. Mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas bawahan;
  - g. Melakukan penyiapan sarana dan prasarana secara tanggap ;
  - h. Mengantisipasi dengan menyiapkan langsung kegiatan saat kegiatan saat kejadian dalam sarana dan prasarana secara langsung;
  - i. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang Sarana dan Logistik Penanggulangan Bencana sebagai bahan masukan untuk penentuan kebijakan lebih lanjut ;
  - j. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan seksi penyiapan sarana dan prasarana darurat sesuai dengan data yang ada berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan untuk dipergunakan sebagai bahan masukan bagi atasan;

k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Sarana dan Logistik Penanggulangan Bencana baik lisan maupun tulisan sesuai dengan tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Bidang Sarana dan Logistik Penanggulangan Bencana.

## 6.2. Seksi Penyediaan dan Distribusi Logistik

(1) Seksi Penyediaan dan Distribusi Logistik mempunyai tugas dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Sarana dan Logistik Penanggulangan Bencana.

(2) Rincian Tugas tersebut pada ayat (1) sebagai berikut :

- a. Merencanakan Kegiatan Seksi penyediaan dan Distribusi Logistik berdasarkan kegiatan tahun sebelumnya serta sumber data yang ada sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan;
- b. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan penyediaan dan distribusi logistik;
- c. Mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mengolah data serta informasi yang berhubungan dengan penyediaan dan distribusi logistik;
- d. Menyiapkan bahan penyusunan kebijaksanaan, pedoman dan petunjuk teknis di bidang penyediaan dan distribusilogistik;
- e. Menginventarisasikan permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan penyediaan dan distribusi logistik serta menyiapkan petunjuk pemecahan masalah;
- f. Mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas bawahan;
- g. Menyiapkan bahan dan analisis data kerusakan akibat bencana, kelompok rentan dan kebutuhan dasar;
- h. Menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama distribusi pemenuhan kebutuhan air bersih dan sanitasi, penyediaan pangan dan sandang, pelayanan kesehatan dan psikososial, serta penyediaan tempat penampungan;

- i. Menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- j. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang Sarana dan Logistik Penanggulangan Bencana sebagai bahan masukan untuk penentuan kebijakan lebih lanjut;
- k. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Penyediaan dan Distribusi Logistik sesuai dengan data yang ada berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan untuk dipergunakan sebagai bahan masukan bagi atasan;
- l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Sarana dan Logistik Penanggulangan Bencana baik lisan maupun tulisan dengan tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Bidang Sarana dan Logistik Penanggulangan Bencana.

#### 7. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi

- (1) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bencana mempunyai tugas pokok membantu kepala dalam melaksanakan kebijakan di bidang Penanggulangan Bencana pada Pasca Bencana;
- (2) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bencana dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
  - a. Penyiapan bahan perumusan bahan kebijakan teknis di bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bencana;
  - b. Penetapan rumusan kebijakan perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik;
  - c. Penetapan rumusan kebijakan normalisasi aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana;
  - d. Penetapan rumusan kebijakan pertumbuhan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban;
  - e. Penetapan rumusan kebijakan peningkatan peranserta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pasca bencana;
  - f. Penetapan rumusan kebijakan penguatan komunitas yang terkena bencana;



- g. Penetapan rumusan kebijakan pemberdayaan sosial ekonomi yang terintegrasi dalam program pembangunan daerah;
  - h. Pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bencana;
  - i. Pembinaan Pelaksanaan tugas di bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bencana;
  - j. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas pokok dan fungsi;
- (3) Susunan Organisasi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bencana, terdiri dari :
- 1. Seksi Rehabilitasi;
  - 2. Seksi Rekonstruksi;

#### 7.1. Seksi Rehabilitasi

- (1) Seksi Rehabilitasi, mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis dan memberikan dukungan atas penyelenggaraan program dan kegiatan dibidang Rehabilitasi.
- (2) Rincian tugas tersebut pada ayat (1) sebagai berikut :
  - a. Merencanakan kegiatan seksi Rehabilitasi berdasarkan kegiatan tahun sebelumnya serta sumber data yang ada sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan;
  - b. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan Rehabilitasi;
  - c. Mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mengolah data serta informasi yang berhubungan dengan Rehabilitasi;
  - d. Menyiapkan bahan penyusunan kebijaksanaan, pedoman dan petunjuk teknis dibidang Rehabilitasi;
  - e. Menginventarisasikan permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan Rehabilitasi serta menyiapkan petunjuk pemecahan masalah;
  - f. Melakukan penyusunan bahan rumusan kebijakan normalisasi aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana;

- g. Melakukan penyusunan bahan rumusan kebijakan percepatan akselerasi bantuan darurat berupa sandang, lauk pauk. Famili kids, kids ware serta beras dan obat-obatan serta makanan tambahan;
- h. Melakukan penyusunan bahan rumusan kebijakan pembangunan kembali semua prasarana dan sarana serta kelembagaan pada wilayah pasca bencana;
- i. Menyiapkan bahan koordinasi dan fasilitasi kegiatan rehabilitasi sosial, ekonomi dan budaya;
- j. Menyiapkan bahan inventarisasi, identifikasi dan analisis dampak negatif sosial psikologis masyarakat akibat bencana;
- k. Menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- l. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi sebagai bahan masukan untuk penentuan kebijakan lebih lanjut;
- m. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Rehabilitasi sesuai dengan data yang ada berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan untuk dipergunakan sebagai bahan masukan bagi atasan;
- n. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi baik lisan maupun tulisan sesuai dengan tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi.

## 7.2. Seksi Rekonstruksi

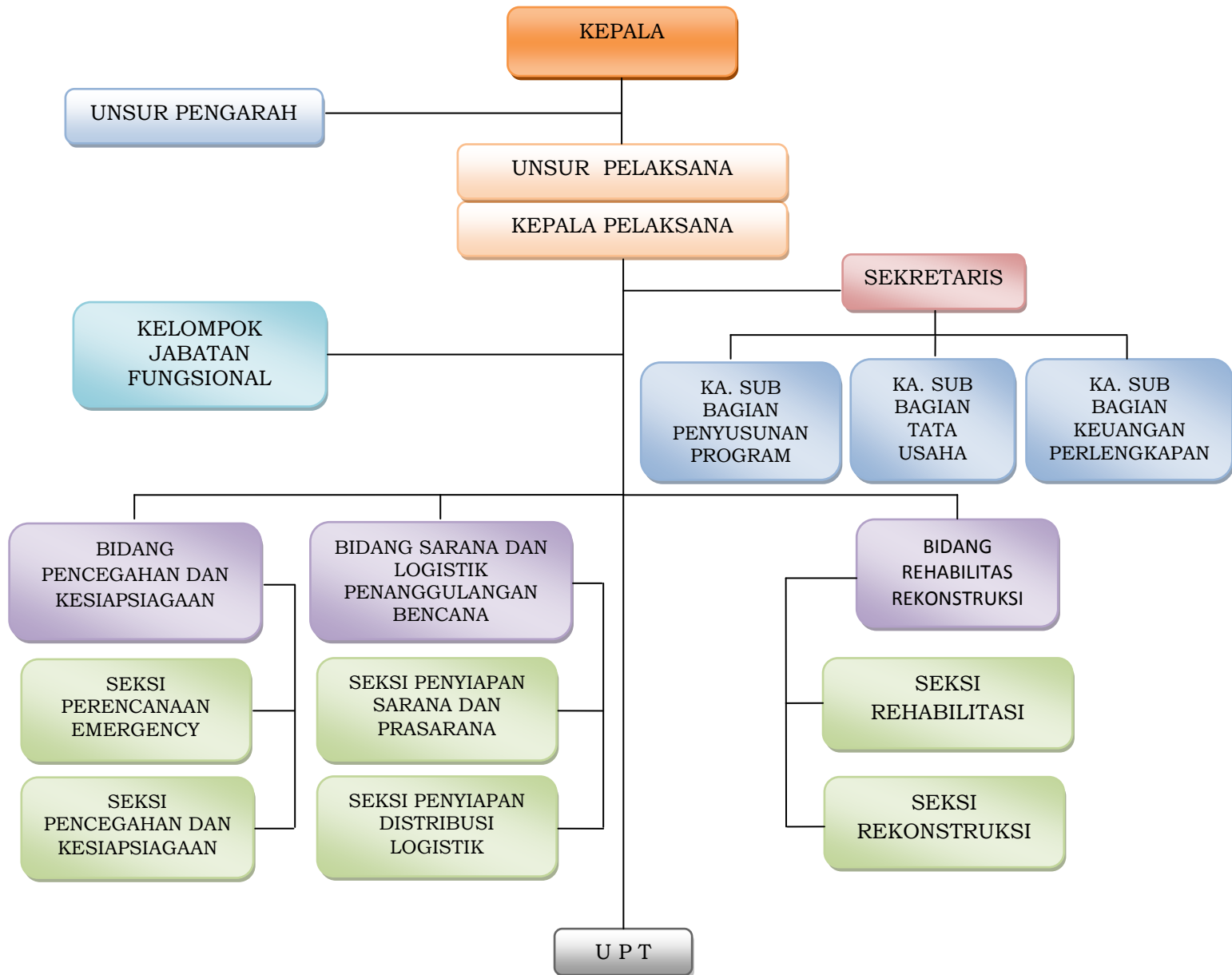
- (1) Seksi Rekonstruksi mempunyai tugas merumuskan kebijakan reknis dan memberikan dukungan atas penyelenggaraan program dan kegiatan dibidang Rekonstruksi.
- (2) Rincian tugas tersebut pada ayat (1) sebagai berikut :
  - a. Merencanakan kegiatan seksi rekonstruks berdasarkan kegiatan tahun sebelumnya serta sumber data yang ada sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan;

- b. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan Rekonstruksi;
- c. Mencari , mengumpulkan, menghimpun dan mengolah data serta informasi yang berhubungan dengan Rekonstruksi;
- d. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendali dan pengawasan program dan kegiatan pejabat fungsional dalam lingkup sub bidang;
- e. Penyiapan bahan pelaksanaan inventarisasi inditifikasi tingkat kerusakan lingkungan pasca bencana;
- f. Penyiapan bahan pelaksanaan inventarisasi identifikasi tingkat kerusakan lingkungan;
- g. Penyiapan bahan koordinasi, fasilitasi dan kerjasama pembangunan kembali dampak kerusakan pasca bencana;
- h. Menyiapkan bahan penyusunan kebijaksanaan, pedoman dan petunjuk teknis dibidang rekonstruksi;
- i. Menginventarisasikan permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan Rekonstruksi serta menyiapkan petunjuk pemecahan masalah;
- j. Melakukan pembinaan, pengkoordinasian pengendalian dan pengawasan program dan kegiatan pejabat fungsional dalam lingkup sub bidang;
- k. Melaksanakan evaluasi program dan kegiatan pejabat fungsional dalam lingkup sub bidang;
- l. Menyusun program kegiatan sub bidang lingkup Rekonstruksi dalam penanganan pasca bencana;
- m. Menyiapkan bahan pelaksanaan inventarisasi identifikasi tingkat kerusakan lingkungan;
- n. Menyiapkan bahan koordinasi, fasilitasi da kerja sama pembangunan kembali dampak kerusakan lingkungan pasca bencana
- o. Melakukan penyusunan bahan rumusan kebijakan pertumbuhan perekonomian, sosial dan budaya tegaknya hukum dan ketertiban;

- p. Melakukan penyusunan bahan rumusan kebijakan peningkatan peranserta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pasca bencana;
- q. Melakukan penyusunan bahan rumusan kebijakan penguatan komunitas yang terkena bencana;
- r. Melakukan penyusunan bahan rumusan kebijakan pemberdayaan sosial ekonomi yang terintegrasi dalam program pembangunan daerah;
- s. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi sebagai bahan masukan untuk penentuan kebijakan lebih lanjut;
- t. Membuat lapoaran pelaksanaan kegiatan seksi Rekonstruksi sesuai dengan data yang ada berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan untuk dipergunakan sebagai bahan masukan bagi atasan;
- u. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bengkulu membentuk struktur organisasi sebagai berikut :

### **STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN BENGKALIS**



## 2.2. Sumber Daya Aparatur Badan Penanggulangan Bencana Daerah

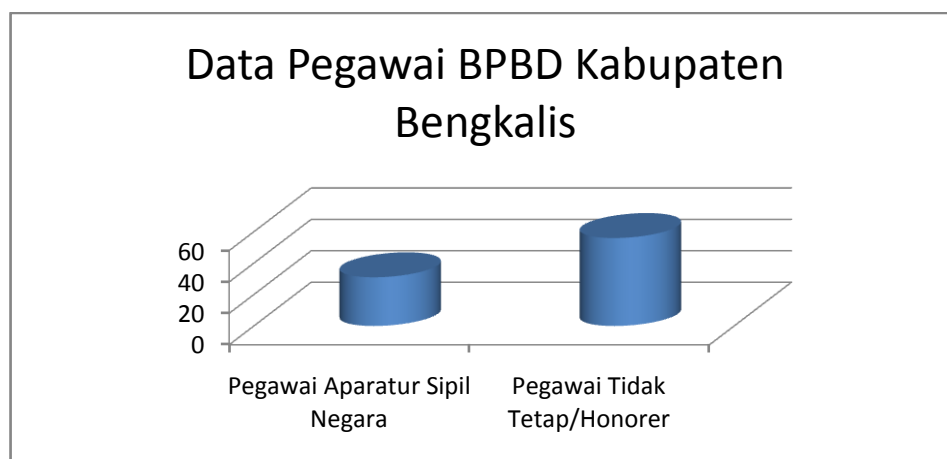
Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkalis telah memiliki kemampuan sumber daya yang ada dan akan dicapai dalam kurun waktu 2016-2021 dengan gambaran matriks sebagaimana berikut:

Tabel 2.2.1.

### Sumber Daya Aparatur Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkalis

#### A. Data Menurut Jumlah ASN

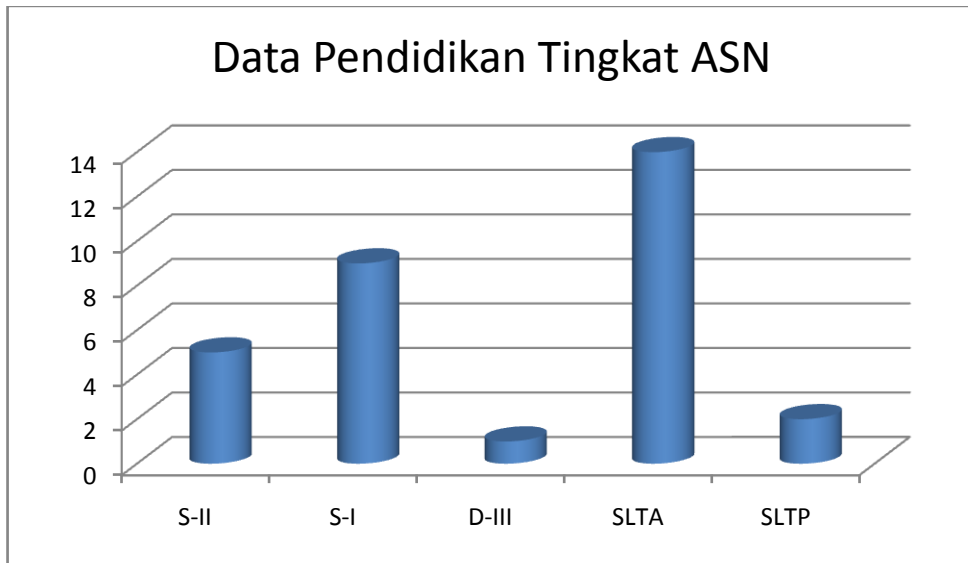
NO.	Klasifikasi Pegawai	Jumlah
1.	Pegawai ASN	31 Orang
2.	Pegawai Tidak Tetap	56 Orang
	Jumlah	87 Orang



Sumber data : Sub. Bagian Tata Usaha BPBD Kab. Bengkalis Th. 2018

#### B. Data Tingkat Kurikulum ASN

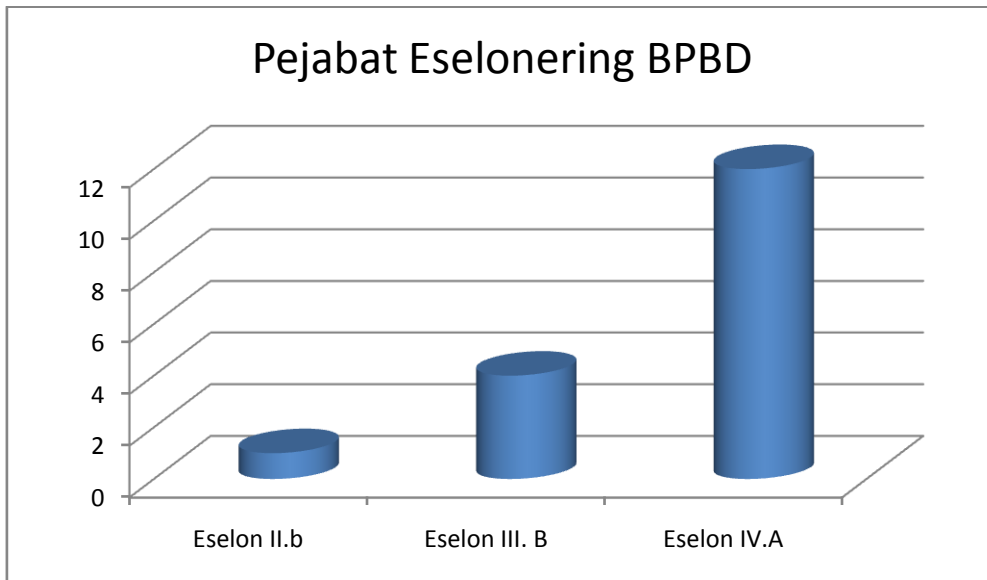
NO.	PENDIDIKAN PEGAWAI	JUMLAH
1.	S-2	5 Orang
2.	S-1	9 Orang
3.	D-III	1 Orang
4.	SLTA	14 Orang
5.	SLTP	2 Orang
	Jumlah	31 Orang



Sumber data : Sub. Bagian Tata Usaha BPBD Kab. Bengkulu Th. 2018

#### C. Eselonering Pegawai/Jabatan

NO.	Eselon/Jabatan	JUMLAH
1.	Eselon II.b	1 Orang
2.	Eselon III.b	4 Orang
3.	Eselon IV.a	12 Orang
	Jumlah	17 Orang



Sumber data : Sub. Bagian Tata Usaha BPBD Kab. Bengkulu Th. 2018

### 2.3. Kinerja Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkalis sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi adalah membantu kepala Daerah khususnya dalam pelayanan dalam bidang Penanggulangan Bencana. Penyelenggaraan pelayanan yang dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkalis kepada masyarakat pada dasarnya untuk memberikan pelayanan yang disesuaikan dengan berbagai aspek pelayanan umum dengan Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Capaian Sasaran terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) yang menunjukkan tingkat capaian kinerja SKPD.

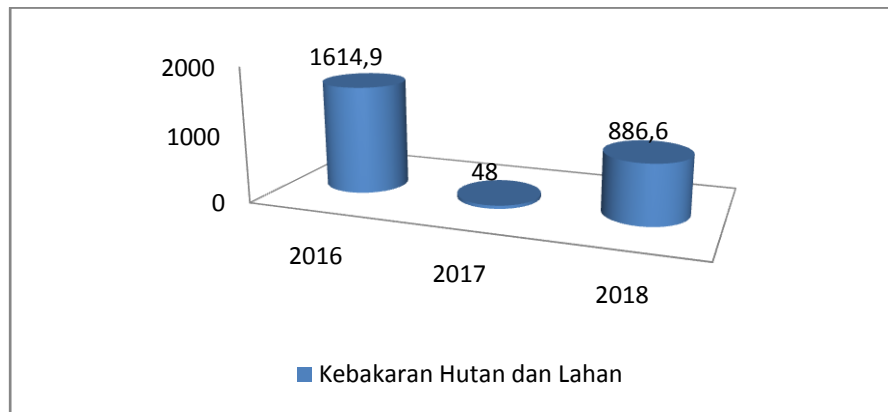
Bencana Asap akibat kebakaran hutan dan lahan mengalami puncak nyapada periode tahun 2014 dimana data luas lahan terbakar tahun 2016 sebanyak ±1614,9 Ha, sehingga mengalami masalah yang sulit dalam melaksanakan penanggulangan

bencana. Hal ini disebabkan luasnya jumlah kebakaran hutan dan lahan yang terjadi sehingga dampak asap yang ditimbulkan menghambat aktivitas masyarakat diluar rumah, bahkan mengganggu dan menyebabkan tidak berjalannya kegiatan belajar mengajar di sekolah. Dampak bencana asap lainnya terlihat pada sektor transportasi udara dikarenakan jarak pandang yang pendek menyebabkan pesawat mengalami kesulitan untuk mendarat.

Pada tahun 2017 terjadi penurunan luas lahan terbakar tercatat ±48 Ha, dengan jumlah kejadian 9 (sembilan) kali kejadian, Pada tahun 2018 terjadi kenaikan luas lahan terbakar tercatat ±886,6 Ha, dengan jumlah kejadian 121 (seratus dua satu) kali kejadian Karhutla di Kabupaten Bengkalis. Selain Bencana Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan badan penanggulangan bencana daerah kabupaten bengkalis juga menangani berbagai bencana lainnya seperti bencana banjir, angin puting beliung dan abrasi pantai.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah kabupaten bengkalis bersama Satuan Tugas Siaga Darurat Penanggulangan Bencana Asap Akibat Kebakaran Hutan dan Lahan kabupaten bengkalis pada tahun 2016-2018 dapat mengurangi jumlah hotspot dan luas areal yang terbakar dari tahun ketahun. Hal ini dapat dilihat pada diagram dibawah ini:





*Sumber :DataHotspotPusdatinBPBDBengkalis2016-2018*

Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwa Luas Lahan terbakar dari tahun 2016 sampai 2018 mengalami penurunan pada tahun 2017 sebanyak ± 48Ha, mengalami kenaikan lagi pada tahun 2018 sebesar ±886.6 Ha dan hingga bulan Maret 2019 sementara Seluas ±903,33 titik hotspot.

#### **2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan pelayanan**

Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkalis disusun dalam koridor Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkalis tahun 2016-2021 dalam rangka pemenuhan tugas dan fungsi di atas.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam hal menjalankan peran sebagai koordinator penanggulangan bencana selalunya berupaya menegaskan bahwa manajemen penanggulangan bencana bukanlah suatu kegiatan yang bersifat mendadak hanya untuk "tanggap darurat", akan tetapi juga meliputi berbagai aspek baik sebelum (pra bencana), maupun pada saat bencana dan setelah bencana (pasca bencana) itu sendiri. Apabila diterapkan kedalam daur program kerja, maka program dan kegiatan penanggulangan bencana merupakan siklus sistemik kegiatan.

Secara umum kegiatan itu menyangkut; kesiapsiagaan, identifikasi bahaya, analisa resiko, tindakan preventif, respon bencana, serta rehabilitasi, dan rekonstruksi yang konsisten dan berkelanjutan, melibatkan berbagai pihak (*stakeholders*) terkait, sesuai ketentuan umum dan tahapan didalam penanggulangan bencana, sesuai Undang-undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

Diharapkan dengan adanya rencana strategis ini, pemenuhan tugas pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkalis dapat dilakukan secara lebih terarah dan terkendali serta senantiasa secara dinamis mengakomodasi dan mengantisipasi perubahan lingkungan internal dan eksternal yang terjadi.

### **BAB III**

## **PERMASALAHAN ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI**

Mengacu pada isu strategis pembangunan Kabupaten Bengkalis 2016-2021 yang dirumuskan dan penting untuk diperhatikan diantaranya ialah *Belum terbangunnya sistem penanggulangan bencana, dan belum terlaksananya koordinasi dan integrasi dengan OPD lain.* Mengingat Kabupaten Bengkalis merupakan daerah dengan ancaman bencana baik kebakaran hutan dan lahan, maupun ancaman Bencana Puting Beliung. Sehingga diperlukan *Pembangunan sistem penanggulangan bencana* yang diharapkan akan mampu mewujudkan pelayanan prima dalam bidang Penanggulangan Bencana di Daerah.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah merupakan organisasi perangkat daerah sesuai tugas pokok dan fungsinya yaitu membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan, khususnya bidang Penanggulangan Bencana. Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai rincian tugas merencanakan, melaksanakan, mengarahkan, mengawasi dan mengendalikan kebijakan pemerintahan di bidang penanggulangan bencana sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah.

Keseluruhan kegiatan tersebut untuk mendukung program pembangunan pemerintah daerah selama 5 tahun ke depan sesuai agenda, prioritas pembangunan strategi dan arah kebijakan daerah diantaranya mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan bersih (*good and clean governance*). Untuk menata sumber daya aparatur hal-hal yang perlu diperhatikan adalah dengan melakukan identifikasi permasalahan berdasarkan tupoksi.

#### **3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi BPBD**

Berdasarkan Pasal 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Unsur Pelaksana BPBD Kabupaten/Kota menyelenggarakan fungsi Pengkoordinasian; Pengkomandoan, dan Pelaksana.

Didalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 Pasal 12, 13 dan 14 dijelaskan Fungsi Koordinasi BPBD adalah Koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah lain yang ada di daerah, instansi vertikal yang ada di daerah, lembaga

usaha, dan/atau pihak lain yang diperlukan pada tahap pra bencana dan pascabencana. Fungsi Komando BPBD adalah pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik dari satu instansi perangkat daerah lainnya, instansi vertikal yang ada di daerahserta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam rangkaian penanganan darurat bencana. Sedangkan Fungsi Pelaksana BPBD adalah melaksanakan secara terkoordinasi dan terintegrasi dengan satu instansi perangkat daerah lainnya di daerah, instansi vertikal yang ada di daerah dengan memperhatikan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi BPBD Kabupaten Bengkalis antara lain :

1. Belum memadainya kinerja aparatur penanggulangan bencana dan kelembagaan.
2. Belum mendukungnya regulasi guna terlaksananya percepatan penyelenggaraan penanggulangan bencana.
3. Keterbatasan Kualitas dan Kuantitas Sumber Daya Manusia (SDM) dalam mendukung upaya penyelenggaraan penanggulangan bencana.
4. Keterbatasan penyediaan anggaran Program dan Kegiatan Penanggulangan Bencana melalui APBD Kabupaten Bengkalis.
5. Masih kurang memadainya sarana dan prasarana dalam pelayanan Penanggulangan bencana.
6. Masih rendahnya kesadaran dan pemahaman masyarakat dan dunia usaha terhadap resiko bencana dan kesiapsiagaan dan penanggulangan bencana.
7. Luasnya jangkauan wilayah kebencanaan, sementara jumlah personil yang khusus menangani bencana masih minim.

Dari beberapa permasalahan yang dihadapi pada pelaksanaan pelayanan penanggulangan bencana, dapat dikelompokkan beberapa faktor yang mempengaruhi baik dari lingkungan internal dan lingkungan eksternal sebagai berikut:

1. Faktor-faktor **Internal** yang mempengaruhi:
  - a. Jumlah petugas/aparatur tidak semua memiliki kemampuan Ilmu Teknologi.
  - b. Sarana Prasarana pelayanan administrasi penanggulangan bencana yang masih kurang memadai.

- c. Beberapa pegawai kurang memahami peraturan penanggulangan bencana yang mengalami perubahan dan perkembangan secara cepat.
2. Faktor-faktor **Eksternal** yang mempengaruhi:
- a. Luasnya jangkauan wilayah kebencanaan sementara jumlah personil yang khusus menangani bencana masih minim.
  - b. Jarak tempuh antara Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan kawasan rawan bencana serta infrastruktur yang kurang mendukung mengurangi kecepatan dan ketepatan penyaluran/penanganan bantuan.

Dari kedua analisis tersebut baik lingkungan internal ataupun eksternal diperoleh hasil sebagai berikut:

1. Adanya undang-undang, peraturan penanggulangan bencana dalam menunjang penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan bidang Penanggulangan Bencana Daerah serta tersedianya dana yang cukup dan semangat kerja pegawai dalam melaksanakan kegiatan dan menciptakan inovasi merupakan kekuatan utama dalam pencapaian Visi.
2. Terbatasnya jumlah aparatur yang menguasai prosedur kebencanaan, kurangnya sarana prasarana yang memadai, serta jarak tempuh yang terlalu jauh dari pusat kendali kebencanaan merupakan kelemahan untuk pencapaian Visi.
3. Adanya dukungan peraturan dan kebijakan tentang penanggulangan bencana merupakan kesempatan bagi PNS terkait peningkatan SDM aparatur melalui penyelenggara diklat, pelatihan dan sosialisasi merupakan peluang yang perlu dimanfaatkan untuk pencapaian Visi.
4. Adanya tuntutan pelayanan yang lebih baik bagi BPBD dalam melayani dan merespon masyarakat di era globalisasi yang menuntut perkembangan sistem pelayanan Penanggulangan Bencana harus mengikuti perubahan merupakan ancaman terhadap pencapaian Visi.

### 3.2. Telaah Visi, Misi RPJMD Kabupaten Bengkalis Tahun 2016-2021

#### 3.2.1. Visi

Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bengkalis yang menggambarkan arah pembangunan yang ingin dicapai dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun periode 2016-2021 sesuai misi yang diembankan adalah sebagai berikut:

#### **“Terwujudnya Kabupaten Bengkalis Sebagai Model Negeri Maju dan Makmur Di Indonesia ”**

Penelaahan terhadap Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih menghasilkan pokok-pokok visi sebagai berikut :

**Model Negeri** : bermakna menjadikan Kabupaten Bengkalis sebagai negeriterdepan dalam penerapan, pengembangan dan pembangunan yang mencerminkan nilai-nilai, karakteristik dan identitas melayu.

**Maju**: bermakna adanya perubahan mendasar pada perilaku kinerja pemerintah daerah yang ditandai meningkatnya indeks kepuasan masyarakat, peningkatan terhadap daya saing daerah dan pertumbuhan ekonomi riil dari kondisi sebelumnya di Kabupaten Bengkalis ditandai dengan menguatnya kemampuan fiskal daerah yang dapat mendukung peningkatan pembangunan konektivitas antar wilayah, perbaikan kondisi lingkungan hidup dan percepatan Pengembangan kawasan

**Makmur** : bermakna meningkatnya pertumbuhan sector-sektor usaha ekonomi masyarakat, penurunan kemiskinan dan meningkatnya indeks pembangunan manusia serta ditandai dengan meningkatnya daya beli masyarakat dan tersedianya lapangan pekerjaan.

#### 3.2.2. Misi

Berdasarkan visi rencana pembangunan jangka menengah kabupaten bengkalistahun 2016-2021 perumusan misinya sebagai berikut:

**Misi Pertama:** Mewujudkan pemerintahan yang berwibawa, transparan dan bertanggung jawab serta dapat melaksanakan kepemimpinan dengan bijak, beranidani khlas.

Peningkatan tata kelola pemerintahan yang reformatif, peningkatan peran masyarakat dalam pembangunan dan pewujudan ide-ide baru gagasan pembangunan dengan pendekatan keunggulan kewilayahan (*spatial strength*) suatu kondisi yang ingin dicapai dalam misi ini.

**Misi Kedua:** Mewujudkan pengelolaan seluruh potensi daerah dan sumber daya manusia untuk kemakmuran rakyat.

Kondisi ini dapat dicapai dengan upaya peningkatan pembangunan ekonomi sektoral, pembangunan dan pemberdayaan manusia yang berkualitas dan penyediaan lapangan pekerjaan.

**Misi Ketiga** : Mewujudkan penyediaan infrastruktur yang berkualitas untuk kesejahteraan rakyat.

Tersedianya prasarana dan sarana konektivitas wilayah dan pemukiman yang berkualitas dengan mempertimbangkan aspek pemanfaatan ruang yang baik, pelestarian lingkungan hidup dan penanggulangan potensi masalah lingkungan di Kabupaten Bengkalis suatu tujuan pada misi ini.

### **3.3. Telaah Renstra BNPB dan Renstra BPBD Provinsi Riau**

#### **3.3.1. Renstra Badan Nasional Penanggulangan Bencana**

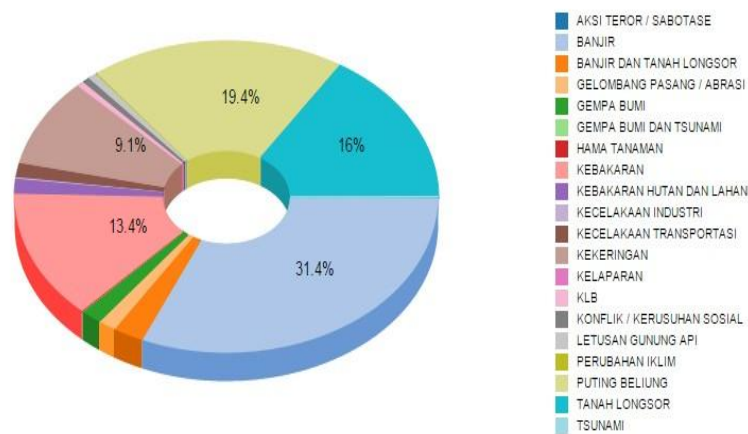
Terbentuknya kelembagaan penanggulangan bencana, baik di Pusat maupun di Daerah merupakan wujud fungsi protektif pemerintah dalam menangkap berbagai permasalahan yang timbul terkait bencana. Dasar pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah, mengacu kepada Peraturan Kepala BNPB Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan BPBD dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja BPBD. BPBD Provinsi sebagai instansi yang berhubungan langsung dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Pusat di Jakarta. Ruang lingkup penanggulangan bencana tidak saja pada saat terjadi bencana, namun mulai dari proses deteksi, pencegahan dini hingga pascabencana.

Disadari bahwa kita hidup dan tinggal di daerah rawan bencana. Sudah seharusnya kita harus tangguh menghadapi semua ancaman bencana. Tangguh merupakan kesadaran yang terinternalisasi dalam sebuah komunitas, sehingga menghasilkan kesiapsiagaan dan kapasitas yang tinggi dalam menghadapi bencana dengan peran dan tanggung

jawab yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 maka BNPB harus mampu mengoptimalkan peran koordinasi penanggulangan bencana di pusat dan daerah. Selain itu BNPB akan terus mendorong upaya keterlibatan masyarakat dalam meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi ancaman bencana serta membangun kesadaran masyarakat dalam upaya pengarusutamaan pengurangan risiko bencana dalam berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara.

Gambar 3.1.

Data Kejadian Bencana Indonesia



Menurut data Badan Nasional Penanggulangan Bencana bahwa bencana terbesar yang terjadi di Indonesia selama tahun 2014 adalah bencana banjir sebesar 31,4%, selanjutnya angin puting beliung sebesar 19,4%, dan disusul longsor dengan presentase sebesar 16%. Bencana-bencana tersebut juga telah melanda beberapa Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi Riau, dan bahkan ada yang sudah merupakan bencana rutin pada setiap tahun, seperti bencana banjir dan angin puting beliung. Dan jika dilihat pada awal tahun 2014, sekitar 96% kejadian bencana di Indonesia masih didominasi oleh bencana hidrometeorologi tersebut, seperti banjir, tanah longsor, puting beliung, gelombang pasang, banjir dan tanah longsor.



Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan

Penanggulangan Bencana, upaya penyelenggaraan penanggulangan bencana dilaksanakan berdasarkan aspek-aspek yang meliputi aspek ekonomi dan budaya masyarakat, kelestarian lingkungan hidup, kemanfaatan dan efektivitas serta lingkungan luas daerah.

Dalam upaya penanggulangan bencana di Indonesia, visi yang ditetapkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana adalah **“Menjadikan Bangsa yang Tangguh Menghadapi Bencana”**. Dalam mewujudkan visi tersebut ditetapkan 4 misi, yaitu :

1. Membangun efektivitas dalam upaya pengurangan risiko bencana pada kawasan yang memiliki risiko bencana, terutama pada pusat-pusat pertumbuhan pembangunan,
2. Meningkatkan efektivitas penanganan tanggap darurat,
3. Melakukan optimalisasi dan percepatan pemulihan wilayah pasca bencana, dan masyarakat yang terkenaan bencana untuk lebih mandiri.
4. Meningkatkan kemampuan dan akuntabilitas dalam tata kelola penanggulangan bencana.

Sesuai hasil kajian lingkungan strategis secara eksternal maupun internal serta sinkronisasi terhadap arah kebijakan dan strategi nasional dibidang penanggulangan bencana, Badan Nasional Penanggulangan Bencana menetapkan arah kebijakan dan strategi dalam kegiatan penanggulangan bencana dalam kurun waktu lima tahun mendatang (2014-2019) adalah:

1. Tersedianya perangkat hukum yang mendorong penyelenggaraan penanggulangan bencana yang efektif dan mandiri ditingkat pusat hingga daerah secara proporsional.
2. Terintegrasi upaya penanggulangan bencana pada kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah dan non pemerintah.
3. Meningkatkan efektivitas mekanisme penyelenggaraan penanggulangan bencana.

4. Diterapkannya strategi yang menjamin terlaksananya pemberdayaan masyarakat secara sinergis yang berorientasi kepada penurunan risiko bencana dengan kearifan lokal dan kemandirian daerah.
5. Meningkatnya kemitraan multi-pihak (pemerintah, lembaga usaha dan masyarakat sipil) dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.
6. Meningkatnya upaya pencegahan dan mitigasi untuk mengurangi potensi korban jiwa, kerugian ekonomi dan kerusakan lingkungan akibat bencana.
7. Meningkatnya kesiapsiagaan dan penanganan darurat untuk menghadapi bencana secara mandiri dan proaktif.
8. Tersedianya mekanisme pendukung dalam menjamin terselenggaranya pemulihan dampak bencana secara mandiri, efektif dan bermartabat.
9. Terselenggaranya pemulihan dampak bencana secara lintas sektor sesuai dengan Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana.
10. Meningkatnya kapasitas SDM serta kelembagaan pemerintah dan non pemerintah terkait penanggulangan bencana.

Adapun Program Prioritas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dalam penanggulangan bencana mencakup :

1. Peningkatan kapasitas daerah melalui:
  - a. Pelatihan penanggulangan bencana berbasis masyarakat
  - b. Pelaksanaan gladi/simulasi kesiapsiagaan
  - c. Penyusunan rencana penanggulangan bencana nasional (*nasional disaster management plan*)
2. Penerapan standar teknik dalam :
  - a. Analisis risiko bencana
  - b. Mitigasi bencana
  - c. Sistem peringatan dini

### 3.3.2. Renstra BPBD Provinsi Riau

Sedangkan di level Provinsi, sasaran jangka menengah BPBD Provinsi Riau terdiri dari 3 sasaran, yaitu:

1. Terlaksananya Pencegahan dan kesiapsiagaan dalam upaya Pengurangan Resiko Bencana (PRB);
2. Terlaksananya penanganan kedaruratan bencana;

### 3. Terlaksananya pemulihan pasca bencana.

Penajaman program dan kegiatan strategis dalam Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2016-2021, mencakup: Rasio pengurangan resiko bencana pada kawasan rawan bencana serta persentase penanganan bencana yang sesuai dengan SOP serta kegiatan strategis dalam kerangka reformasi birokrasi internal Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

#### **3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah**

Jika ditinjau melalui rencana tata ruang wilayah, kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah kabupaten diantaranya adalah melaksanakan kebijakan pengurangan resiko bencana.

Dari isu strategi tersebut sasaran yang diharapkan salah satunya adalah meningkatnya ketangguhan masyarakat terhadap bencana yaitu dengan cara peningkatan kualitas masyarakat dalam menghadapi bencana dan pengembangan sistem manajemen penanganan bencana terpadu serta peningkatan kualitas pengelolaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana.

Pencapaian pengendalian kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud dengan strategi meliputi:

- a. Menetapkan kawasan rawan bencana alam sesuai sifat dan jenis bencana alam berupa bencana kebakaran hutan dan lahan, Abrasi, Puting Beliung dan Banjir;
- b. Mengidentifikasi tingkat resiko wilayah pada kawasan rawan bencana alam;
- c. Mengembangkan jalur dan ruang evakuasi bencana sesuai sifat dan jenis bencana, serta karakteristik wilayah;
- d. Mengembangkan sistem mitigasi bencana; dan
- e. Mengembangkan manajemen perencanaan, pencegahan, kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana pada kawasan rawan bencana alam.

Untuk mewujudkan perencanaan dan pengendalian kawasan rawan bencana alam perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Melakukan pemetaan kawasan rawan berupa bencana;
- b. Dilakukannya kegiatan-kegiatan sosialisasi terhadap wilayah masyarakat yang memiliki potensi bahaya bencana;
- c. Pembangunan ruang evakuasi bencana;

- d. Pembangunan jalur-jalur evakuasi;
- e. Penetapan daerah rawan bencana sebagai kawasan konservasi.

Haltersebutperlu segeradilakukanmengingatadanyabeberapa halyang selama ini menjadi faktor penghambat pelayanan Penanggulangan Bencana Daerahsebagai berikut:

- a. MasihterbatasnyakoordinasiBPBDdenganPDdalam penanggulangan bencanadisebabkanminimnyakesadarandanpemahamanmasyarakatakan artipenting ancaman bencana.Sementara ini masih adaparadigma meremehkanbencanayang berimbaspadamimnyaanggaranuntuk kebencanaan.Padahalresikoyang ditimbulkanbencanaselama iniberdampak serius padatatanankehidupanbermasyarakat.Semuahasilpembangunan selamabertahun-tahun dapatmusnahhanyadalamwaktu singkat.
- b. Keterlambatan pelayanan yang diakibatkan luasnya wilayah penanganan bencana sehinggadiperlukanekstrawaktutempuhkarena jarakantaraBadan PenanggulanganBencanaDaerah dengan lokasikebencanaan yang ada.

### **3.5. Penentuan Isu-isu Strategis**

Berdasarkan hasil telaahan dari Berbagai aspek seperti tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkalis, Visi dan Misi Kepala Daerah Renstra Badan Nasional Penanggulangan Bencana, RenstraBadan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Riau, Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkalis serta ditinjau dari tata ruang wilayah dapat disimpulkan dalam Penanggulangan Penanganan Penanggulangan Bencana, baik sebagai hal pendorong maupun penghambat yang mempengaruhi Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkalis, diantaranya :

1. Pelaksanakan kebijakan pengurangan resiko bencana (PRB)
2. Peningkatan dan pembinaan pengurangan resiko bencana desa/kelurahan
3. Pemantapan koordinasi dan penyelenggaraan penanganan bencana
4. Pelaksanaan keterpaduan penanganan bencana
5. Pelaksanaan penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana

Isu Strategis adalah permasalahan utama yang di sepakati untuk dijadikan prioritas penanganan selama 5(lima) tahun mendatang sebagaimana di

informasikan sebelumnya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkalis mempunyai Tugas Fungsi melaksanakan segala urusan dan pelayanan Penanggulangan Bencana jika dikaitkandenganbeberapafaktorpenghambat masih sulitnyakoordinasi denganDinas /InstansiKementeriandanProvinsimakapelayananjelas memakanwaktulamapadahaldisisilain penangananbencanamembutuhkan waktuyangsesegeramungkinkarenaterkaitdengankeselamatan harta benda dan nyawapengungsi akibatkejadianbencana.

Sasaran dalam Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun2016-2021, mencakup: Pengembangan sistem manajemen penanggulangan bencana, Penyempurnaan berbagai kebijakan dan peraturan perundang-undangan penanggulangan bencana, Pembangunan dan pengembangan sistem penyelenggaraan pelayanan administrasi dan penanggulangan bencana, penegakan pelaksanaan peraturan perundang-undangan penanggulangan bencana, melanjutkan pembangunan dan pengembangan sistem informasi manajemen penanggulangan bencana, serta kegiatan strategis dalam kerangka reformasi birokrasi internal Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Bidang penanggulangan bencana di daerah terutama, belum menjadi prioritas di dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) terkait bidang kebencanaan. Potensi ancaman bencana pada umumnya baru sebatas dijelaskan dan dideskripsikan dalam aspek geografis serta demografis ke daerahan. Ancaman bencana ini belum diangkat menjadi isu strategis pembangunan daerah ataupun telah dicantumkan sebagai isu strategis dalam rancangan teknokratik RPJMD namun tidak menjadi visi/misi politik calon kepala daerah. Akibat kurangnya perhatian mengenai isu kebencanaan ini, penganggaran bagi penanggulangan bencana di daerah dari sumber Badan Penanggulangan Bencana Daerah belum dapat mencukupi.

Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dapat di tuangkan dalam rencana pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam. Rencana Penanggulangan Bencana ini memuat pengenalan ancaman dan kerentanan masyarakat, pilihan tindakan pengurangan risiko bencana, penentuan mekanisme kesiapan dan penanggulangan bencana, serta

alokasi tugas, kewenangan, dan sumber daya yang tersedia di daerah. Proses penyusunan RPB memberikan kesempatan untuk meningkatkan koordinasi dan komunikasi antar instansi terkait dalam pembagian tugas dan mengenai kewenangan masing-masing. Pengintegrasian RPB ke dalam RPJMD merupakan upaya strategis untuk memastikan ketersediaan pendanaan bagi penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah.

Terdapat berbagai macam upaya yang dapat dilakukan untuk mengintegrasikan RPB ke dalam RPJMD salah satunya dengan melakukan peningkatan kapasitas daerah di daerah. Sesuai dengan kaidah penyelenggaraan penanggulangan bencana, kapasitas penanggulangan bencana juga ditinjau pada fase terdapat potensi terjadinya bencana dan fase tanggap darurat. Pelaksanaan penanggulangan bencana pada fase tersebut mengharuskan adanya kapasitas perencanaan untuk menetapkan kebijakan dan strategi yang efektif untuk menanggulangi bencana. Sistem peringatan dini dan analisis risiko merupakan tuntutan kapasitas untuk mengembangkan skenario, kebijakan dan strategi kontijensi. Selanjutnya isu-isu strategis terkait Penanggulangan Bencana di Provinsi Riau sesuai amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 :

1. Penguatan Pengurangan Resiko Bencana

Penanggulangan Bencana

dititikberatkan pada pengurangan resiko bencana, hal ini menjadi paradigma baru penanggulangan bencana, pemahaman terhadap pengurangan resiko bencana sangat minim. Dalam menyikapi isu ini Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Riau mesti menjadi pelopor untuk pengurangan resiko bencana di Provinsi Riau agar masyarakat Riau terlindungi dari ancaman bencana.

2. Pembenahan Sistem Penanggulangan Bencana

Penanggulangan Bencana di Provinsi Riau selama ini cenderung bersifat Responsif, seharusnya dilakukan secara preventif, untuk mewujudkan itu perlu dibuat Sistem Penanggulangan Bencana yang handal dengan menerapkan Manajemen Bencana baik pada saat Pra Bencana, Saat Bencana dan Pasca Bencana.

3. Pemulihan Pasca Bencana

Penanganan Bencana selamainiselasalufokus pada saatkejadianbencana,ketika bencana telah berakhir semua dianggap sudah berakhir, sebagaimana yang kita saksikanterhadapjalan,turab,bangunanrobokibatbencana terbiarkanbegitusaja hingga bertahun-tahun.Semestinya sesuaidenganparadigmabarupenanggulangan bencanapemulihan pascabencana perlu dilakukan.

4. Penguatan Kelembagaan

SebagaiLembagayangdituntuteksistensinya agar mampu menjalankan amanat Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Riau masih sangat terbatas dalam hal sarana, prasarana, serta kapasitas aparaturnanggap darurat bencana.

5. Pemberdayaan Masyarakat dan Dunia Usaha

PenanggulanganBencanaadalahtanggung jawabbersamayaitu,Pemerintah, MasyarakatdanDuniaUsaha,namunsaatini pemahaman penanggulanganbencana adalahtanggung jawabbersamamasih sangatminimsehinggaperludisialisasikan agar masyarakat dan dunia usaha bisa berperan serta didalam penanggulangan bencana.

## **BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN**

### **4.1. Visi dan Misi BPBD Kabupaten Bengkalis**

#### 4.1.1. Visi BPBD Kabupaten Bengkalis

Visi adalah gambaran ideal yang ingin dicapai oleh organisasi di masa yang akan datang, yang merupakan pernyataan komitmen bersama dari seluruh anggota organisasi yang akan menerapkan rencana-rencana strategis dalam pencapaian visi organisasi. Visi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkalis disusun dengan mengacu kepada Visi Pembangunan Kabupaten Bengkalis yang tertuang dalam Rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021.

Seperti diketahui, Visi Pemerintah Kabupaten Bengkalis adalah; *“Terwujudnya Kabupaten Bengkalis Sebagai Model Negeri Maju dan Makmur di Indonesia”*. sedang Visi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) adalah; *“Ketangguhan Bangsa Dalam Menghadapi Bencana”*, maka dengan semangat dan alasan filosofis itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkalis merumuskan Visi:

**“Mewujudkan Ketangguhan Masyarakat Kabupaten Bengkalis  
Dalam Menghadapi Bencana ”.**



Visi tersebut bermakna bahwa masyarakat mempunyai kesadaran yang kuat dalam sebuah komunitas sehingga menghasilkan kesiapsiagaan dan kapasitas yang tinggi dalam menghadapi bencana. Dalam hal ini memiliki kemampuan untuk :

- Mengantisipasi ancaman yang ada di sekitarnya.
- Melindungi, dapat berupa perlawanan atau menghindari terhadap ancaman.
- Mengadaptasi terhadap ancaman yang terjadi.
- Bangkit kembali dari akibat bencana yang menimpanya.

#### 4.1.2. Misi BPBD Kabupaten Bengkalis

Dalam upaya mewujudkan Visi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkalis, telah ditetapkan 3 (tiga) Misi yang menjadi pedoman lima tahun kedepan adalah :

1. Mewujudkan peran serta kepedulian masyarakat terhadap kesiapsiagaan dan resiko bencana.
2. Mewujudkan pengelolaan penanggulangan Bencana yang handal dan komprehensif.
3. Mewujudkan sistem manajemen dan pemerintahan yang baik.

Gambar 4.1  
Hubungan Visi dan Misi

	<b>RPJMD</b>	<b>RENSTRA</b>
<b>Visi</b>	Terwujudnya kabupaten bengkalis sebagai model negeri maju dan makmur di Indonesia	Mewujudkan Ketangguhan Masyarakat Kabupaten Bengkalis Dalam Menghadapi Bencana
<b>Misi 1</b>	Mewujudkan pemerintahan yang berwibawa, transparan dan bertanggung jawab serta dapat melaksanakan kepemimpinan dengan bijak, berani dan ikhlas	Mewujudkan peran serta kepedulian masyarakat terhadap kesiapsiagaan dan resiko bencana.
<b>Misi 2</b>	Mewujudkan pengelolaan potensi Daerah dan Sumber Manusia untuk Kemakmuran Rakyat	Mewujudkan pengelolaan penanggulangan Bencana yang handal dan komprehensif.

<b>Misi 3</b>	Mewujudkan penyediaan infrastruktur yang berkualitas untuk kesejahteraan rakyat	Mewujudkan sistem manajemen dan pemerintahan yang baik.

Pelaksanaan Misi dalam mewujudkan visi Kabupaten Bengkulu pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkulu, terkait dengan paradigma penanggulangan bencana yang menekan manajemen resiko bencana sesuai Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

Dalam hal ini dinyatakan bahwa penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang beresiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi. Dimana upaya pencegahan bencana yang sering terjadi di Kabupaten Bengkulu seperti Kebakaran Hutan dan Lahan, Banjir serta Angin Puting Beliung perlu dilakukan melalui peningkatan penataan lingkungan dan kebersihan.

Selanjutnya, tugas pokok Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkulu terkait Misi tersebut, berdasarkan Peraturan Bupati Bengkulu Nomor 65 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi serta rincian tugas pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkulu, antara lain :

- a. Menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi serta rekonstruksi secara adil dan setara.
- b. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
- c. Menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana.
- d. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanggulangan bencana.

- e. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada kepala Daerah setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana.
- f. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang.
- g. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari APBD.

## **4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BPBD**

### **4.2.1. Tujuan**

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Dengan diformulasikannya tujuan strategis ini maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkalis dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi memenuhi visi dan misinya untuk kurun waktu satu sampai lima tahun ke depan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki.

Adapun tujuan strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkalis adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan peran aktif masyarakat dan kepedulian pengurangan resiko bencana.
2. Meningkatkan waktu response penanggulangan bencana.
3. Meningkatkan kualitas pelayanan pasca bencana.
4. Meningkatkan capaian akuntabilitas kinerja dan keuangan.

Untuk mengukur sejauhmana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkalis telah mencapai tujuan strategis yang telah ditetapkan, pada masing-masing tujuan strategis ditetapkan indikator kinerja dan target yang harus dicapai pada akhir tahun kelima (2021).

### **4.2.2. Sasaran**

Sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkalis merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis dan merupakan dasar yang kuat untuk mengendalikan dan memantau pencapaian kinerja. Penjabaran mengenai sasaran pada masing-masing tujuan strategis dapat dilihat sebagai berikut :

1. Peningkatan ketangguhan masyarakat terhadap bencana.
2. Peningkatan kualitas waktu response penanggulangan bencana terpadu.
3. Peningkatan kualitas pelayanan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana.
4. Peningkatan kualitas capaian kinerja dan keuangan.

Untuk lebih jelasnya tentang tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan SKPD dapat dilihat pada sebagai berikut:

Tabel 4.1

**TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN BENGKALIS  
TAHUN 2016-2021**

Visi	: Mewujudkan Ketangguhan Masyarakat Kabupaten Bengkalis dalam Menghadapi Bencana.
Misi	: 1. Mewujudkan peran serta kepedulian masyarakat terhadap kesiapsiagaan dan resiko bencana. 2. Mewujudkan pengelolaan penanggulangan bencana yang handal dan komprehensif. 3. Mewujudkan sistem manajemen dan pemerintahan yang baik.

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET TAHUN					
				2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Meningkatkan Peran Aktif Masyarakat dan Kepedulian Pengurangan Resiko Bencana	Meningkatnya Ketangguhan masyarakat terhadap Siaga bencana	Persentase desa/kelurahan masyarakat siaga bencana		5%	15%	25%	35%	50%
			Level Tingkat Kesiapsiagaan		Level 2	Level 2	Level 3	Level 4	Level 4
2.	Meningkatkan Response Penanggulangan Bencana	Meningkatnya Kualitas waktu response penanggulangan Bencana	Rata-rata waktu response kejadian bencana		20%	50%	70%	85%	100%
		Meningkatnya Kualitas Tanggap Darurat	Persentase bencana alam yang ditanggulangi		15%	20%	25%	30%	50%
3.	Meningkatkan Pengelolaan Pasca Bencana	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan pasca bencana	Persentase penyelesaian rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana		70%	75%	80%	90%	100%

			Indeks Kepuasan Masyarakat		50%	70%	85%	95%	100%
4.	Meningkatkan capaian akuntabilitas kinerja dan keuangan	Meningkatnya kualitas capaian kinerja	Predikat akuntabilitas kinerja		CC	CC	B	B	BB
			Persentase tindak lanjut pemeriksaan keuangan		100%	100%	100%	100%	100%

Tujuan ini merupakan tujuan strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bengkalis yang merupakan salah satu tujuan akhir. Tercapainya tujuan ini apabila seluruh Kecamatan/Desa/Kelurahan di akhir tahun 2021 sudah mencapai desa siaga bencana, sesuai dengan target dalam RPJMD dan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bengkalis. Penjabaran dari tujuan ini secara lebih spesifik dan terukur adalah sebagai berikut: Dari tabel di atas dapat dilihat indikator-indikator pengukuran capaian sasaran dan tujuan jangka menengah SKPD. Agar lebih memudahkan pelaksanaan evaluasi dan pencapaian indikator tersebut, perlu dijelaskan formulasi perhitungan dari masing-masing indikator. Adapun formulasi masing-masing indikator dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.2  
Formulasi masing-masing indikator kinerja utama terhadap sasaran

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL/ PENJELASAN	FORMULASI PERHITUNGAN INDIKATOR
1.	Meningkatnya Ketangguhan masyarakat terhadap bencana	Persentase desa/kelurahan Masyarakat Siaga bencana	Punya pengetahuan masyarakat terhadap siaga bencana dengan pengetahuan yang dimiliki sesuai dengan kondisi bencana	Masyarakat desa/kelurahan yang belum mendapat sosialisasi/edukasi pentingnya kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana sangat minim
		Level Tingkat Kesiapsiagaan	Punya pengetahuan yg memadai, bersertifikat mengikuti pelatihan dan punya pengalaman menangani bencana lebih dari 2 kali kejadian	Level 4 : punya pengetahuan yg memadai, bersertifikat mengikuti pelatihan dan punya pengalaman menangani bencana lebih dari 2 kali kejadian
2.	Meningkatnya Kualitas waktu response penanganan Bencana	Persentase Rata-rata waktu response kejadian bencana	Tingkat waktu siap tanggap saat kejadian bencana oleh petugas pusdatin di lokasi kurang dari 30 menit, dan menginformasikan tim rescue sesuai SOP tanggap darurat	'=(Jumlah waktu yang efektif kurang dari 24 jam)/(Jumlah response time saat kejadian bencana) x100%
		Persentase bencana alam yang di tanggulangi	Jumlah pemulihan daerah terdampak bencana melalui kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi	Jumlah bantuan yang disalurkan sesuai jumlah penerima bantuan dewasa, anak-anak dan lansia.
3.	Meningkatnya Pengolahan pasca bencana	Persentase penyelesaian rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana	- Melaksanakan program Jitu Pasma yang di insruksikan dari BNPB pusat dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi daerah pascabencana.	- Melaksanakan peningkatan SDM tentang program jitupasna melalu pelatihan dari tahap proses pendataan lapangan sampai dengan proses pembentukan dokumen jitupasna.

			- Melaksanakan analisa kebutuhan pasca bencana.	Membutuhkan sarana prasarana penunjang dalam pelaksanaan menganalisa pascabencana baik dilapangan maupun sebaliknya.
			- Koordinasi program rehabilitasi dan rekonstruksi Renaksi terhadap kegiatan pelaksanaan BPBD	Pelatihan atau mengikuti seminar mengenai renaksi baik tingkat kabupaten provinsi maupun nasional.
		Indeks Kepuasan Masyarakat	Jenis bantuan sesuai dengan kondisi bencana (rumah, perkebunan/pertanian, ternak, fasilitas umum, kondisi kejiwaan masyarakat yang terdampak bencana) bencana/musibah yaitu berupa makanan siap saji dan logistik kebutuhan dasar	Jumlah luasan, kondisi fisik dan fasilitas yang terdampak bencana
4.	Meningkatnya kualitas capaian kinerja	Predikat akuntabilitas kinerja	Jumlah Sumber Daya Aparatur SDM BPBD yang Profesional Handal dalam melaksanakan target kinerja sesuai yang direncanakan	Nilai hasil Evaluasi AKIP
		Persentase tindak lanjut pemeriksaan keuangan	Jumlah hasil temuan yang berhasil di tindak lanjuti	Persentase hasil temuan BPK/Inspektorat yang di tindak lanjuti



**BAB V**  
**STRATEGI DAN DAN ARAH KEBIJAKAN**

**5.1. Strategi dan Arah Kebijakan**

Strategis dan arah kebijakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkalis merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis dan merupakan dasar yang kuat untuk mengendalikan dan memantau pencapaian kinerja. Penjabaran mengenai sasaran pada masing-masing tujuan strategis dapat dilihat pada tabel 5.1

Tabel 5.1  
Tujuan,Sasaran,Strategi dan kebijakan

<b>Visi: Mewujudkan Ketangguhan Masyarakat Kabupaten Bengkalis dalam Menghadapi Bencana</b>			
<b>Misi 1 :Mewujudkan peran serta kepedulian masyarakat terhadap kesiapsiagaan dan resiko bencana.</b>			
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah kebijakan</b>
1. Meningkatkan Peran Aktif Masyarakat dan Kepedulian Pengurangan Resiko Bencana	1. Meningkatnya ketangguhan Masyarakat terhadap Bencana	1. Peningkatan kualitas masyarakat dalam menghadapi Bencana	1. Melaksanakan kebijakan Pengurangan Resiko Bencana
<b>Misi 2 : Mewujudkan pengelolaan penanggulangan bencana yang handal dan Komprehensif</b>			
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah kebijakan</b>
1. Meningkatkan Response Penanggulangan Bencana	1. Meningkatnya kualitas waktu Response Penanggulangan Bencana	1. Meningkatnya Sistem Manajemen penanganan Bencana Terpadu	1. Pemantapan penyelenggaraan penanganan bencana
	2. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Pasca Bencana		2. Pelaksanaan keterpaduan Penanganan Bencana
2. Meningkatkan Pengelolaan Pasca Bencana	1. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Pasca Bencana	2. Peningkatan kualitas pengelolaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana	1. Pelaksanaan penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana

<b>Misi 3 : Mewujudkan sistem manajemen dan pemerintahan yang baik</b>			
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah kebijakan</b>
1. Meningkatkan Capaian Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	1. Meningkatnya kualitas Capaian Kinerja	1. Peningkatan Tata Kelola dan Manajemen Pemerintahan yang Baik	1. Mewujudkan Akuntabilitas Pengelolaan Kinerja dan Keuangan

**BAB VI**  
**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN,**  
**INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN**  
**DAN PENDANAAN INDIKATIF**

**6.1. Rencana Program dan Kegiatan**

Untuk mewujudkan visi dan Misi Perangkat Daerah melalui pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkalis menetapkan program-program dan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan. Perencanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah berpedoman pada Program Pembangunan Daerah dalam RPJMD 2016-2021 menurut urusan pemerintahan sebagai berikut :

Program Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah

- 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
- 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- 3) Program Peningkatan Disiplin Aparatur
- 4) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- 5) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
- 6) Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam

Untuk pencapaian Program Strategis tersebut, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkalis telah merencanakan berbagai kegiatan. Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan secara rutin setiap tahunnya, namun demikian beberapa kegiatan di antaranya merupakan kegiatan baru, dan sebagian diantaranya berupa kegiatan penunjang maupun lanjutan. Kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan tersebut antara lain sebagai berikut :

**6.2. Matrik Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	Target kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Indikatif										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra		
								2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja		
								Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
1	Meningkatnya tata kelola administrasi, sarana prasarana dan akuntabilitas kinerja dan keuangan	Meningkatnya kualitas pengelolaan administrasi	Cakupan pelayanan administrasi umum dan kepegawaian 100%	3.00 3.07 1.01. 01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan layanan administrasi kantor (umum dan kepegawaian)		100%	1.044.600.000	100%	1.884.495.000	100%	2.123.895.000	100%	2.196.854.100	100%	2.196.854.100	100%	9.446.698.200	
					3.00.07.01.001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	jumlah surat masuk dan keluar yang dilayani dalam 1 tahun, jumlah tenaga Administrasi, Operator komputer tenaga arsip yang disediakan dalam 1 tahun		2800 Lembar, 1 Orang	36.000.000	2800 lembar, 1 Orang	36.600.000	1650 lembar, 1 Orang	33.600.000	2000 lembar, 3 Orang	68.200.000	2000 lembar, 3 Orang	68.200.000	11250 Lembar, 9 Orang	242.600.000
					3.00.07.01.002	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksananya layanan jasa telpon, internet, air dan listrik dalam 1 tahun		12 Bulan	125.000.000	12 Bulan	222.000.000	12 Bulan	240.000.000	12 Bulan	249.600.000	12 Bulan	249.600.000	60 Bulan	1.086.200.000
					3.00.07.01.006	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara dalam 1 Tahun		4 Unit	20.000.000	10 Unit	48.000.000	9 Unit	250.000.000	15 Unit	92.500.000	15 Unit	92.500.000	53 Unit	503.000.000

				3.00.07.01.008	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Peralatan dan Bahan Kebersihan yang disediakan dalam Satu Tahun; Jumlah Tenaga Kebersihan yang disediakan dalam Satu Tahun		24 Item, 4 Orang	100.000.000	22 Item, 12 Orang	299.270.000	21 Item, 4 Orang	299.270.000	21 Item, 8 Orang	164.350.000	21 Item, 8 Orang	164.350.000	109 Item, 36 Orang	1.027.240.000
				3.00.07.01.010	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Alat Tulis yang Tersedia dalam 1 Tahun		58 Item	100.000.000	60 Item	129.925.000	36 Item	129.925.000	38 Item	101.139.100	36 Item	101.139.100	228 Item	562.128.200
				3.00.07.01.011	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Jumlah barang cetakan dan pengadaan yang terpenuhi dalam 1 tahun		8 Item	50.000.000	8 Item	58.700.000	8 Item	58.700.000	8 Item	64.250.000	8 Item	64.250.000	40 Item	295.900.000
				3.00.07.01.012	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor dalam 1 tahun		12 Item	30.000.000	12 Item	85.000.000	11 Item	85.000.000	11 Item	75.615.000	11 Item	75.615.000	57 Item	351.230.000
				3.00.07.01.015	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan dalam 1 tahun		3600 Exp	30.000.000	10080 Exp	56.400.000	10080 Exp	56.400.000	10080 Exp	56.400.000	10080 Exp	56.400.000	439200 Exp	255.600.000
				3.00.07.01.017	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah box/porsi makanan dan minum untuk keperluan rapat dan kegiatan BPBD Kabupaten Bengkalis Setiap tahunnya		1000 Box	50.000.000	1000 Box	60.000.000	13000 Box	82.400.000	18374 Box	174.000.000	18374 Box	174.000.000	51748 Box	540.400.000

				3.00.07.01.018	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah dan Dalam Daerah	Frekuensi dilakukannya Koordinasi dan Konsultasi Luar dan Dalam daerah		200 kali	350.000.000	300 kali	700.000.000	300 kali	700.000.000	330 kali	850.000.000	330 kali	850.000.000	1460 kali	3.450.000.000
				3.00.07.01.019	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	Jumlah Tenaga Keamanan Kantor		8 Orang	153.600.000	8 Orang	153.600.000	8 Orang	153.600.000	12 Orang	230.400.000	12 Orang	230.400.000	48 Orang	921.600.000
				3.00.07.01.033	Penyediaan Jasa Sopir Kantor	Jumlah Tenaga Sopir Kantor								2 Orang	38.400.000	2 Orang	38.400.000	4 Orang	76.800.000
				3.00.07.01.034	Publikasi Informasi Pembangunan	Jumlah media informasi yang disediakan dalam 1 tahun				40 Media	35.000.000	40 Media	35.000.000	50 Media	32.000.000	50 Media	32.000.000	180 Media	134.000.000
2		Meningkatkan kualitas pengelolaan administrasi	Cakupan pengelolaan sarana dan prasarana aparatur 100%	<b>3.00.07.01.02</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Persentase pemenuhan sarana dan sarana termasuk pemeliharaan</b>		<b>100%</b>	<b>1.423.798.600</b>	<b>100%</b>	<b>3.428.850.000</b>	<b>100%</b>	<b>3.764.295.000</b>	<b>100%</b>	<b>9.805.936.700</b>	<b>100%</b>	<b>9.805.936.700</b>	<b>100%</b>	<b>28.228.817.000</b>
				3.00.07.01.02.005	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan dinas operasional yang tersedia dalam 1 tahun								25 unit	2.516.310.000	25 unit	2.516.310.000	56 unit	5.032.620.000
				3.00.07.01.02.007	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Kantor yang tersedia dalam 1 tahun		19 Unit	161.299.600	21 unit	1.326.500.000	21 unit	1.292.600.000	46 Unit	1.396.470.000	46 Unit	1.396.470.000	103 unit	5.573.339.600
				3.00.07.01.02.009	Pengadaan Peralatan gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung kantor yang tersedia dalam 1 tahun		20 Unit	99.499.000	61 unit	293.350.000	10 Unit, 36 set	314.195.000	29 Unit	396.620.000	29 Unit	396.620.000	111 Unit, 108 Set	1.500.284.000
				3.00.07.01.02.010	Pengadaan Mebeleur	Jumlah Mebeleur Kantor yang tersedia dalam 1 Tahun				55 unit	100.000.000	55 unit	100.000.000	94 unit, 1 set	198.420.000	94 unit, 1 set	198.420.000	220 Unit	596.840.000

				3.00. 07.0 1.02. 011	Pengadaan Kendaraan Apung	Jumlah kendaraan dinas/operasio nal apung yang tersedia dalam 1 tahun						2 Unit	360.92 0.000	2 Unit	360.92 0.000	2 Unit	721.840. 000		
				3.00. 07.0 1.02. 022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Frekuensi yang dilakukan Pemeliharaan Gedung kantor dalam 1 tahun		20 Kali	425.000. 000	30 Kali	684.000.0 00	50 Kali	982.500. 000	15 Kali	350.00 0.000	15 Kali	350.00 0.000	130 Kali	2.791.50 0.000
				3.00. 07.0 1.02. 024	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasi onal yang dilakukan Pemeliharaan		8 Unit	388.000. 000	9 Unit	500.000.0 00	9 Unit	425.000. 000	15 Unit	518.00 0.000	15 Unit	518.00 0.000	44 Unit	2.349.00 0.000
				3.00. 07.0 1.02. 028	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Frekuensi peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang dipelihara dalam 1 tahun		100 Kali	75.000.0 00	100 Kali	175.000.0 00	100 Kali	150.000. 000	100 Kali	100.00 0.000	100 Kali	100.00 0.000	500 Unit	600.000. 000
				3.00. 07.0 1.02. 030	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Apung	Jumlah kendaraan apung yang dikeluarkan pemeliharaan dalam 1 tahun		2 Unit	275.000. 000	4 Unit	350.000.0 00	4 Unit	500.000. 000	4 Unit	500.00 0.000	4Unit	500.00 0.000	21 Unit	2.125.00 0.000
				3.00. 07.0 1.02. 042	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Jumlah gedung yang direhabilitasi sedang/berat								3 unit	2.628. 156.70 0	3 unit	2.628. 156.70 0	3 unit	5.256.31 3.400
				3.00. 07.0 1.02. 055	Pembangunan Fasilitas Gedung Kantor	Terpenuhinya sarana dan prasarana fasilitas gedung kantor								4 paket	614.92 0.000	4 paket	614.92 0.000	4 paket	1.229.84 0.000
				3.00. 07.0 1.02. 285	Peningkatan sarana dan prasarana pendukung kendaraan apung	Jumlah hangar kendaraan apung yang tersedia dalam 1 tahun								1 unit	226.12 0.000	1 unit	226.12 0.000	1 unit	452.240. 000
3		Meningkatkan kualitas sumberd	Cakupan peningkatan kinerja dan disiplin aparatur	<b>3.00 .3.0 0.07 .01. 03</b>	<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	<b>Persentase pemenuhan sarana penunjang disiplin aparatur</b>		<b>100%</b>	<b>100.000 .000</b>	<b>100%</b>	<b>100.000.0 00</b>	<b>100%</b>	<b>200.000 .000</b>	<b>100%</b>	<b>245.9 00.00 0</b>	<b>100%</b>	<b>245.9 00.00 0</b>	<b>100%</b>	<b>891.800 .000</b>

		aya dan kinerja aparatur	95%	3.00.07.01.03.011	Pengandaan Pakaian Petugas Lapangan dan Perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas kerja lapangan		200 Pasang	100.000.000	200 Pasang	100.000.000	200 Pasang	200.000.000	233 Pasang	245.900.000	233 Pasang	245.900.000	1070 Pasang	891.800.000
4		Meningkatnya kualitas sumber daya dan kinerja aparatur	Cakupan peningkatan dan pengembangan kompetensi tenaga ASN BPBD	<b>3.00.3.00.07.01.05</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>Persentase pegawai yang memiliki kompetensi sesuai fungsinya</b>		<b>100%</b>	<b>100.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>580.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>580.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>928.325.000</b>	<b>100%</b>	<b>928.325.000</b>		<b>3.116.650.000</b>
				3.00.07.01.05.010	Bimbingan Teknis Tentang Pelayanan Publik Instansi Pemerintah	Jumlah sumber daya aparatur yang mengikuti diklat		40 Orang	100.000.000	40 Orang	150.000.000	40 Orang	150.000.000	40 orang	300.000.000	40 orang	300.000.000	200 orang	1.000.000.000
				3.00.07.01.05.131	Pelatihan Manajemen Penanggulangan Bencana	Persentase kemampuan aparatur dalam penanggulangan bencana				100%	130.000.000	100%	130.000.000	100%	-	100%	-	100%	260.000.000
				3.00.07.01.05.154	Bimbingan Teknis Penanggulangan Bencana	Jumlah Petugas Rescue Penanggulangan bencana yang Profesional Handal				30 Orang	200.000.000	30 Orang	200.000.000	30 Orang	200.000.000	30 Orang	200.000.000	120 Orang	800.000.000
				3.00.07.01.05.165	Pendidikan Latihan Dasar RESCUE Penanggulangan Bencana	Jumlah petugas rescue penanggulangan yang mengikuti pelatihan dasar penanggulangan bencana				40 Orang	100.000.000	40 Orang	100.000.000						200.000.000
				3.00.07.01.05.195	Bimbingan Teknis Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bencana	Jumlah peserta yang mengikuti bimtek rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi bencana								50 orang	121.140.000	50 orang	121.140.000	100 Orang	242.280.000



				3.00.07.01.05.196	Bimbingan Teknis Pusat Data dan Informasi (PUSDATIN)	Jumlah peserta pusdatin yang mengikuti bimbingan teknis							17 Orang	307.185.000	17 Orang	307.185.000	39 Orang	614.370.000	
5		Meningkatnya kualitas sumber daya dan kinerja aparatur	Cakupan laporan realisasi anggaran dan tindakan pemeriksaan keuangan	<b>3.00.07.01.06</b>	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan dilaksanakan tepat waktu</b>		<b>100%</b>	<b>250.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>777.307.500</b>	<b>100%</b>	<b>930.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>1.522.181.100</b>	<b>100%</b>	<b>1.522.181.100</b>	<b>100%</b>	<b>5.001.669.700</b>
		Meningkatnya kualitas capaian kinerja dan penatausahaan keuangan		3.00.07.01.06.032	Peningkatan Pusat Data dan Informasi (PUSDATIN)	Jumlah Petugas pusdatin Penanggulangan Bencana		13 Orang	250.000.000	16 Orang	550.000.000	17 Orang	650.000.000	22 Orang	927.707.000	22 Orang	927.707.000	90 Orang	3.305.414.000
				3.00.07.01.06.043	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan	Jumlah laporan dan dokumen perencanaan yang disusun		-	-	6 Laporan	20.000.000	6 Laporan	30.000.000	6 Laporan	338.018.700	6 Laporan	338.018.700	24 Laporan	726.037.400
				3.00.07.01.06.044	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Penanggulangan Bencana	jumlah laporan data kejadian bencana dikecamatan		-	-	22 Laporan	207.307.500	22 Laporan	250.000.000	22 Laporan	256.455.400	22 Laporan	256.455.400	88 Laporan	970.218.300
6	Meningkatkan Peran Aktif Masyarakat dan Kepedulian Pengurangan Resiko Bencana	Meningkatnya Ketangguhan Masyarakat Terhadap Bencana	Persentase Desa/kelurahan tangguh Bencana	<b>6.00.01.07.01.2</b>	<b>Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam</b>	<b>Persentase Kesiapsiagaan Masyarakat Terhadap Bencana</b>		<b>100%</b>	<b>2.307.250.800</b>	<b>100%</b>	<b>2.900.700.300</b>	<b>100%</b>	<b>5.885.241.800</b>	<b>100%</b>	<b>12.676.462.576</b>	<b>100%</b>	<b>13.533.333.776</b>	<b>100%</b>	<b>38.102.989.252</b>
				6.00.01.2001	Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana Alam	Tersedianya informasi pemantauan dan informasi rawan bencana		8 Kecamatan	248.785.600	11 Kecamatan	340.475.600	11 Kecamatan	202.011.700	11 Kecamatan	424.778.200	11 Kecamatan	424.778.200	52 Kecamatan	1.640.829.300

				6.00. 01.2 2.01 1	Rakor Penanggulangan Bencana Alam	Jumlah Peserta yang mengikuti Rapat koordinasi Penanggulan n Bencana Alam		80 Orang	225.126. 400	80 Orang						160 Orang	225.126. 400
				6.00. 01.2 2.03 1	Penguatan Kapasitas Anggota Masyarakat Peduli Bencana Kec. Bukit Batu dan Siak Kecil	Terlaksananya penguatan kapasitas pemberdayaan masyarakat peduli bencana		2 Kecam atan	250.000. 000							2 Kecam atan	250.000. 000
				6.00. 01.2 2.03 2	Pembangunan Fasilitas Rambu- Rambu dan Pos Penjagaan Pengurangan Resiko Bencana	Tersedianya Pos dan Rambu -rambu Pencegahan pengurangann resiko bencana				1 Lokasi	376.859.2 00					1 Lokasi	376.859. 200
				6.00. 01.2 2.03 3	Penyusunan Strategi dan Kebijakan Penanggulangan Bencana Berkas Masyarakat di Kab. Bengkalis	Tersedianya data informasi strategi kebijakan penanggulan n bencana dalam kecamatan sekabupaten bengkalis						1 Doku men	599.47 8.847	1 Doku men	599.47 8.847	1 Doku men	1.198.95 7.694
				6.00. 01.2 2.03 4	Sosialisasi Peringatan Dini Penanggulangan Bencana Secara Terpadu	Jumlah Aparatur dan Masyarakat yang mengikuti sosialisasi peringatan dini penanggulan n bencana secara terpadu										1 Doku men	800.000. 000
				6.00. 01.2 2.03 5	Penguatan Kapasitas Pemberdayaan Masyarakat Peduli Bencana	Jumlah Kecamatan Penguatan Kapasitas pemberdayaan masyarakat peduli bencana				11 Kecam atan	250.000.0 00	11 Kecam atan	250.000. 000			22 Kecam atan	500.000. 000

				6.00.01.2.2.04.0	Rapat koordinasi penetapan status siaga darurat bencana asap akibat kebakaran hutan dan lahan	Jumlah peserta rapat koordinasi penetapan status siaga darurat bencana asap akibat kebakaran hutan dan lahan							450 orang	177.901.200	450 orang	177.901.200	900 orang	355.802.400	
				6.00.01.2.2.04.1	Penyusunan Ranperda Strategi dan Kebijakan Penanggulangan Bencana Berbasis Masyarakat di Kab.Bengkalis	Jumlah dokumen strategi dan kebijakan penanggulangan bencana berbasis masyarakat									1 Dokumen	428.435.600	1 Dokumen	428.435.600	
				6.00.01.2.2.04.2	Sosialisasi Perda Strategi dan Kebijakan Penanggulangan Bencana Berbasis Masyarakat di Kab. Bengkalis	Jumlah Peserta yang mengikuti Sosialisasi Perda Strategi dan Kebijakan Penanggulangan Bencana Berbasis Masyarakat di Kab. Bengkalis									60 Orang	428.435.600	60 Orang	428.435.600	
				6.00.01.2.2.04.3	Pembangunan Fasilitas Penjagaan Pengurangan resiko Bencana	Jumlah fasilitas penjagaan pengurangan resiko bencana yang dibangun				1 Unit	400.000.000	9 unit	1.979.920.329	9 unit	1.979.920.329	10 unit		4.359.840.658	
				6.00.01.2.2.04.6	Rapat Koordinasi Penanggulangan Bencana Alam	Jumlah Peserta yang mengikuti Rapat koordinasi Penanggulangan Bencana Alam								80 Orang	173.149.300	80 Orang	173.149.300	160 Orang	346.298.600
				6.00.01.2.2.04.8	Penyiapan Posko Siaga Bencana Alam di Kabupaten Bengkalis	Tersedianya pos koordinasi dalam rangka siaga bencana alam di kabupaten bengkalis								5 unit	552.610.900	5 unit	552.610.900	10 unit	1.105.221.800

				6.00.01.2.2.04.9	Edukasi Kesiapsiagaan dalam Menghadapi Bencana di Kabupaten Bengkalis	Jumlah Masyarakat dan Siswa yang tanggap, tangkas dan tangguh bencana di kabupaten bengkalis								11 Kecamatan	501.300.000	11 Kecamatan	501.300.000	22 Kecamatan	1.002.600.000
				6.00.01.2.2.05.0	Penguatan Kapasitas Pemberdayaan Masyarakat Penanggulangan Bencana	terorganisirnya masyarakat penanggulangan bencana di kecamatan (MPB)								11 Kecamatan	220.284.400	11 Kecamatan	220.284.400	22 Kecamatan	440.568.800
Meningkatkan Response Penanggulangan Bencana	Meningkatnya Kualitas Waktu Response Kejadian Bencana	Persentase Penanggulangan Bencana Alam	6.00.01.2.2.01.2	Bantuan Logistik Bagi Penduduk di Tempat Penampungan Sementara	Jumlah Bantuan logistik yang diserahkan kepada korban bencana		8 kecamatan	750.000.000	8 kecamatan	374.000.000								16 Kecamatan	1.124.000.000
			6.00.01.2.2.01.9	Koordinasi Penyelamatan Evakuasi Penanggulangan Bencana	Terlaksananya Penyelamatan evakuasi penanggulangan bencana		11 kecamatan, 15 Orang	473.338.800,00	11 kecamatan, 30 Orang	1.229.365.500	11 kecamatan, 30 Orang	1.622.305.100	11 kecamatan, 63 Orang	3.033.520.000	11 kecamatan, 63 Orang	3.033.520.000	55 kecamatan, 201 Orang	9.392.049.400	
			6.00.01.2.2.04.5	Pendistribusian Bantuan Logistik Kepada Korban Bencana	Jumlah distribusin logistik kepada korban bencana						150 orang	150.000.000	600 orang	431.630.400	600 orang	431.630.400	1350 orang	1.013.260.800	
Meningkatkan Pengelolaan Pasca Bencana	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Pasca Bencana	Persentase Penyelesaian Kondisi Pasca Bencana	6.00.01.2.2.02.2	Rehabilitasi Daerah Rawan Bencana	Laporan Koordinasi Rehabilitasi/R ekonstruksi untuk Daerah Bencana		1 Dokumen	180.000.000										1 Dokumen	180.000.000
			6.00.01.2.2.02.7	Pendataan Kerusakan dan Kerugian Pasca Bencana	Tersedianya Data kerugian dan Kerusakan Akibat Bencana		1 Laporan	180.000.000	1 Laporan	180.000.000								2 laporan	360.000.000

			6.00.01.2.2.04.4	Koordinasi Rehabilitasi/Rekonstruksi Daerah Rawan Bencana	Jumlah Laporan Koordinasi Rehabilitasi/Rekonstruksi untuk Daerah Bencana				1 Laporan	150.000.000					1 Laporan	150.000.000												
			6.00.01.2.2.05.1	Identifikasi dan Inventarisasi Daerah Rawan Bencana	Jumlah dokumen identifikasi dan inventarisasi sarana prasarana daerah rawan bencana				2 Dokumen	1.330.000.000		2 Dokumen	1.330.000.000		4 Dokumen	2.660.000.000												
			6.00.01.2.2.05.2	Koordinasi Fasilitas dan Rehabilitasi Daerah Rawan Bencana	Laporan koordinasi fasilitas dan rehabilitasi daerah bencana				1 laporan	657.868.000		1 laporan	657.868.000		2 laporan	1.315.736.000												
			6.00.01.2.2.05.3	Pembangunan Fasilitas Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rawan Bencana	Terpenuhinya fasilitas rehabilitasi dan rekonstruksi rawan bencana				2 paket	2.082.564.000		2 paket	2.082.564.000		4 paket	4.165.128.000												
			6.00.01.2.2.05.4	Inventarisasi Dampak pada daerah Rawan Bencana Pasca Bencana	tersedianya data yang akurat serta dampak yang teridentifikasi pada daerah pasca bencana				1 Dokumen	511.457.000		1 Dokumen	511.457.000		2 Dokumen	1.022.914.000												
			6.00.01.2.2.05.5	Penanganan Siaga Bencana Asap Akibat Kebakaran Hutan dan Lahan (Pergeseran Belanja Tidak Terduga)	Jumlah desa/kelurahan Siaga Bencana Asap			11 Kecamatan	3.260.925.000,00						11 Kecamatan	3.260.925.000												
<b>TOTAL PAGU PENDANAAN INDIKATIF</b>										<b>5.225.649.400</b>						<b>9.671.352.800</b>		<b>13.483.431.800</b>				<b>27.375.659.476</b>				<b>28.232.530.676</b>		<b>84.788.624.152</b>

**BAB VII**  
**INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH**  
**YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD**

Pencapaian kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkalis digambarkan dan ditetapkan secara kualitatif dan kuantitatif yang mencerminkan gambaran capaian indikator kinerja program (*outcomens/hasil*) yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan jangka menengah dan indikator kegiatan (*output/keluaran*).

Berikut ini, secara rinci indikator kinerja pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bengkalis untuk kurun waktu 5 (lima) tahun 2016 – 2021 dapat dilihat pada Tabel 6.1 :

Tabel 6.1  
 Indikator Kinerja tahun 2016-2021

NO	INDIKATOR	Kondisi Kerja pada Periode RPJMD	TARGET KINERJA TAHUN KE						Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Persentase Desa/Kelurahan Masyarakat Siaga Bencana	-	-	5%	15%	25%	80%	100%	100%
2.	Level Tingkat Kesiapsiagaan	-	-	Level 2	Level 2	Level 3	Level 4	Level 4	Level 4
3.	Rata – Rata Waktu Response Kejadian Bencana	-	-	20%	50%	70%	85%	100%	100%
4.	Meningktanya Kualitas Tanggap Darurat	-	-	15%	20%	25%	30%	50%	100%
5.	Persentase Penyelesaian Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana	-	-	70%	75%	80%	90%	100%	100%
6.	Indeks Kepuasan Masyarakat	-	-	50%	70%	85%	95%	100%	100%
7.	Predikat Akuntabilitas Kinerja	-	-	CC	CC	B	B	BB	BB
8.	Persentase Tindak Lanjut Pemeriksaan Keuangan	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%

## **BAB VIII PENUTUP**

RESNTRA Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkalis adalah dokumen yang berisikan program rencana PD dalam satu (1) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang telah dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Secara continiu dokumen ini juga menjadi acuan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana dimasa mendatang oleh para pemimpin manajemen dan seluruh staf Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkalis sehingga diharapkan akan diperoleh peningkatan kinerja kearah yang lebih baik.

Bengkalis, 24 Juli 2019

KEPALA PELAKSANA BPBD  
KABUPATEN BENGKALIS

Ir. H. TAJUL MUDARRIS, MT  
Pembina Utama Muda  
NIP.19630717 199303 1 005